



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2022

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, Januari 2023
Kepala Dinas,

H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680805 199402 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIVE

Dasar pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika di Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	2,11	76,73

Capaian kinerja di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu **2,75** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **2,11** dengan predikat **Cukup**. Hal ini dikarenakan Belum adanya peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Timur dan Belum berkelanjutannya pengembangan SDM secara khusus untuk penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik provinsi kaltim.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Aparatur	5
E. Aspek Organisasi Strategis	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
G. Sarana dan Prasarana Kantor	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2017	18
B. Pengukuran Capaian Kinerja	24
C. Analisis Capaian Kinerja	25
D. Realisasi Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 3. Laporan Keuangan Dan Fisik Diskominfo pada TEPRA Tahun 2022
- Lampiran 4. Laporan Kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Tahun 2022
- Lampiran 5. Rekapitulasi Media Online TA. 2022
- Lampiran 6. Laporan indeks kami Prov Kaltim
- Lampiran 7. Laporan Monitoring SSL Tahun 2022
- Lampiran 8. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
- Lampiran 9. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi
- Lampiran 10. Buku Profil Data Statistik Sektorial Provinsi Kaltim Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan pemerintahan Bidang Statistik. Dukungan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan pemerintahan Bidang Statistik.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- d. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- e. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset., dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta

pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan dibantu:

1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, dengan dibantu:

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika, dengan dibantu:



1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.
2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi;

Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

C. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini :



D. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 122 orang pegawai terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil dan 70 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 52 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMIN	
				Laki2	Perempuan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Madya/ IV-c	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	2	
		Pembina/ IV-a	S2		2
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	



5	Kepala Seksi	Penata Tk. I/ III.d	S1		1
		Pembina/ IV-a	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S2	4	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	2
		Penata / III-c	S2	1	1
		Penata / III-c	S1		
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Penata Tk. I/ IV-a	S2		
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	
		Penata /III-c	S2	1	
		Penata /III-c	S1	2	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	4	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	D3		2
		Penata Muda Tk.I/ III-b	SMA	3	1
		Penata Muda/ III-a	S1		1
		Penata Muda/ III-a	D3	1	
		Penata Muda/ III-a	SLTA	2	1
		Pengatur Tk. I/ II-d	D3		
		Pengatur Tk. I/ II-d	SLTA	3	
		Pengatur/ II-c	D3	1	1
		Pengatur/ II-c	SLTA	1	2
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	2	
		Pengatur Muda/ II-a	SMA		
		Pengatur Muda/ II-a	SLTP		
		Pengatur Muda/ II-a	SD		
		Total	51	35	16

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang. Peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui pembangunan telecenter di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
4. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian SKPD oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
5. Pembangunan Data Center.
6. Dialog interaktif.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Implementasi SPBE belum optimal.
2. Tuntutan publik terhadap keterbukaan Informasi semakin tinggi.

Sehingga akar permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan Teknologi Informatika dan komunikasi ke depan adalah:

1. Belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu
2. Belum diterapkannya SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
3. Jangkauan infrastruktur TIK keseluruhan wilayah dan semua lapisan masyarakat belum optimal.
4. Keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK.
5. Belum terstandarisasinya sistem keamanan informasi elektronik (TIK).
6. Masih tingginya konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi hoax.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2.242	m ²
2	Gedung	2	Unit (2 Lantai)
3	Ruang Persediaan	1	Ruang
4	Ruang Pengadaan	1	Ruang



No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
5	Mushola	1	Unit
6	Kantin	1	Buah
7	Listrik	3	Jaringan
8	Air	2	Jaringan
9	Telepon	2	Line (1 Fax)
10	Area Parkir	1	Area
11	Ruang Rapat	2	Ruang
12	Ruang Arsip	1	Ruang
13	Ruang CS	1	Ruang
14	Komputer	135	Unit
15	Laptop	93	Unit
16	Printer	13	Unit
17	Scanner	5	Unit
18	Mesin Fotocopy	2	Unit
19	Mobil Dinas	8	Unit
20	Mobil operasional	5	Unit
21	Motor Dinas	9	Unit
22	Website	1	Buah
23	Papan Pengumuman	1	Buah
24	LED Display	2	Buah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi, Aplikasi Informatika, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

"TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR."

Maksud dari visi diatas adalah "Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas" memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam system pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek system pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

TABEL 2. PERENCANAAN STRATEGIS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN S/D TH.2018	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks		2,66	2,82	3,24		
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase					80%	85%

TABEL 2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM		KEGIATAN	
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pelayanan publik	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
				2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase	1.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
				2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
				3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
				4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah. IKU Dinas Komunikasi dan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks /Predikat SPBE	$\frac{n 1}{n 0} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>n 1 = Nilai Indeks SPBE</p> <p>n 0 = Nilai ambang bawah indeks/ predikat SPBE yang ditetapkan:</p> <p>a. 4.2 = Memuaskan</p> <p>b. 3.5 = Sangat Baik</p> <p>c. 2.6 = Baik</p> <p>d. 1.8 = Cukup</p> <p>e. 0 = Kurang</p>	Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Pengukuran Kinerja pe Bidang}}{4 \text{ Bidang}} \times 100\%$	Hasil evaluasi RENJA 2021 dar BAPPEDA Prov. Kaltim	Dinas Komunikasi dan Informatika

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75
2	Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase	80%

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp71.125.067.693,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp87,730,375,101,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 65.510.097.601,- dan Belanja Modal Rp22.220.277.500,-. Adapun realisasi anggaran sebesar

Rp83.881.219.719,- (95,61%) dengan rincian belanja operasi Rp61.758.711.440,- (94,27%) dan belanja Modal Rp22.122.508.279 (99,56%).

2. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 2.4. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022		
		ANGGARAN BELANJA (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	%
1	Belanja Operasi	65.510.097.601	61.758.711.440	94,27
2	Belanja Modal	22.220.277.500	22.122.508.279	99,56
Jumlah		87,730,375,101	83,881,219,719	95.61

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	7,362,108,000	100%	
2	Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 64,18 atau dengan predikat penilaian B (Baik) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	20,08	25,97	5,89
2	Pengukuran Kinerja	25	11,25	13,13	1,88
3	Pelaporan Kinerja	15	10,87	10,60	(0,27)
4	Evaluasi Internal	10	2,21	3,42	1,21
5	Pencapaian Kinerja	20	12,88	11,06	(1,82)
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,29	64,18	6,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH / BELUM
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan seluruh indikator tujuan dan sasaran yang ada dalam dokumen renstra dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan; • Terdapat kondisi yang lebih baik/inovasi yang dapat dibuktikan setelah dilakukannya reviu terhadap renstra; • Capaian target kinerja pada Rencana Kerja Tahunan dijadikan dasar untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penghargaan (<i>reward</i>); - Memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang/tidak berkinerja; - Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik,cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, dll) suatu kondisi atau keadaan. • Menyusun mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja • Menjadikan target kinerja pada rencana aksi sebagai acuan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan yang dapat dibuktikan pelaksanaan kegiatannya; • Seluruh target kinerja dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Program/tujuan telah disusun selaras dengan tujuan dan sasaran. • Telah dilakukan review terhadap renstra agar selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines dan isu strategis yang berkembang di daerah. • Tujuan dan sasaran pada PK telah relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, dan memuat sasaran yang diwujudkan dalam renstra, selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines, dan mencantumkan target kinerja secara periodic didalam dokumen rencana aksi. • Telah dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja. • Target rencana aksi telah dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi capaian output 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH / BELUM
	<p>perjanjian kinerja tahunan dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon II dan IV</p>	<p>kegiatan organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kinerja yang dibuat telah selaras dengan kinerja bawahannya. 	
2	<p>Pengukuran kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam pengumpulan data kinerja ditetapkan penanggung jawab yang jelas dan diberikannya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; Menyelaraskan target Indikator Kinerja Individu dengan target IKU perangkat daerah; Pengukuran kinerja diterapkan sampai tingkat staf; Pengumpulan data kinerja lebih andal untuk meminimalisir tingkat kesalahan; Melakukan pengukuran secara berkala terhadap realisasi target yang terdapat dalam Rencana Aksi; Menggunakan bantuan teknologi dalam melakukan Pengukuran kinerja IKU dijadikan sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran; Hasil pengukuran IKU dijadikan dasar penilaian kinerja, dasar <i>reward dan punishment</i>, dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat; Seluruh Rekomendasi atas hasil monitoring pencapaian target kinerja eselon II dan IV 	<ul style="list-style-type: none"> IKU telah representative untuk mengukur kinerja yang seharusnya jumlahnya memadai dan menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya. Telah memanfaatkan Pengukuran rencana aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan progres,tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> IKU menggunakan formula perhitungan yang telah ditentukan oleh PermanpanRB

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH / BELUM
	<p>ditindaklanjuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jabatan eselon IV ke atas telah menerima <i>reward dan punishment</i> yang sebanding dengan hasil pengukuran kinerjanya; • Terdapat kondisi yang lebih baik/inovasi yang dapat dibuktikan setelah dilakukannya reuiu IKU; • Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (<i>progress</i>) kinerja, dasar mengambil tindakan (<i>action</i>) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, dasar menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 		
3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya; • Laporan kinerja menyajikan semua informasi mengenai kinerja secara konsisten dan dapat diverifikasi; • Laporan kinerja dimanfaatkan secara ekstensif dan menyeluruh dalam perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun; • Laporan kinerja dimanfaatkan secara ekstensif dan menyeluruh dalam penilaian dan perbaikan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - IKU telah dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH / BELUM
	<p>pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan kinerja dimanfaatkan secara ekstensif dan menyeluruh dalam perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik dalam periode berikutnya; • Laporan kinerja dimanfaatkan secara ekstensif dan menyeluruh dalam menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar <i>reward dan punishment</i>. 	<p>anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan. - Telah Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya. 	
4	<p>Evaluasi Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk disepakai dengan pihak yang terkait guna menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi; • evaluasi program disertai simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup untuk ditindaklanjutinya rekomendasi; • evaluasi program disertai rekomendasi yang terkait perencanaan kinerja dan persetujuan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi. • Telah melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan. • Telah melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi rencana aksi telah melalui pembahasan secara bertahap melalui rapat triwulan • Pemantauan rencana aksi secara berkala dituangkan dalam bentuk laporan rencana aksi per triwulan

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH / BELUM
	<p>dilaksanakannya rekomendasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi program disertai rekomendasi yang terkait peningkatan kinerja dan persetujuan untuk dilaksanakannya rekomendasi; • pemantauan rencana aksi memberikan penilaian terhadap seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternative perbaikan; • hasil evaluasi menunjukkan perbaikan pada setiap triwulan; • seluruh rekomendasi atas evaluasi program dilakukan tindak lanjut dengan langkah-langkah nyata. 		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan tata kelola SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatkan layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi sehingga dapat mencapai bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; • Selalu berupaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome sehingga yang akan datang pencapaian sasaran kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal; dan • Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus telah memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap penanggung jawab program dan kegiatan telah menyampaikan laporan kegiatan

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2,75	2,11	76,73
<i>Keterangan : Realisasi merupakan hasil Pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2022 dari Kemenpan RB</i>								
2	Peningkatan Pemanfaatan	Persentase Peningkatan	Persentase	80%	Triwulan I			

teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi			Triwulan II			
				Triwulan III			
				Triwulan IV	80%	80%	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis yaitu **"Optimalisasi Tata Kelola Manajemen SPBE Yang Efektif Dan Efisien Serta Meningkatnya Layanan Infrastruktur SPBE Yang Terintegrasi"** pada tahun 2022 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	2,11	76,73
2	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase	80%	80%	100%

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu **2,75** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **2,11** dengan predikat **Cukup**. Hal ini dikarenakan Belum adanya peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Timur dan Belum berkelanjutannya pengembangan SDM secara khusus untuk penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik provinsi kaltim.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021
			Tahun 2021	Tahun 2022	
	1	2	3	4	5 = (4/3-1)*100
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,22	2,11	-4,95% (Penurunan)

Pada tabel diatas menunjukkan adanya penurunan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2021 ke tahun 2022.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Target RPJMD/RENSTRA

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA (Th. 2023)	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
	1	2	3		5 = 3/4*100
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,40	2,11	62,06%
2	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase	80%	80%	100%

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 tercapai **2,11** dengan **predikat cukup**. Hasil Realisasi Tahun 2022 belum mencapai target Indeks yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu **2,75** Hal ini dikarenakan Belum adanya peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Timur dan Belum berkelanjutannya pengembangan SDM secara khusus untuk penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik provinsi kaltim.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi	Lebih Kurang
1	2	3	4	5	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2.22		

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022 dalam mewujudkan Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE adalah ;

1. Faktor pendukung keberhasilan / kegagalan capaian kinerja

Pemahaman tentang SPBE yang belum secara komprehensif oleh Tim Koordinasi SPBE Provinsi Kaltim dan Kolaborasi antar Tim Koordinasi SPBE.

2. Permasalahan

- Peranan tim SPBE Kaltim belum maksimal.
- Adanya perbedaan yang signifikan antara penilaian dari Kemenpan dengan penilaian mandiri dikarenakan adanya tambahan variabel penilaian dari KemenPANRB yang tidak disampaikan sebelumnya kepada Pemprov. Kaltim
- Capaian penilaian SPBE dipengaruhi oleh capaian SPBE Kabupaten/Kota

3. Solusi

- Mengoptimalkan peran Tim SPBE Kaltim
- Melakukan koordinasi dengan tim penilai Kemenpan dalam rangka mendapatkan informasi dan penyamaan persepsi terhadap indikator-indikator / variabel-variabel yang di syaratkan untuk pencapaian indeks SPBE
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten /kota dalam rangka pencapaian indeks SPBE

4. Upaya

Di Tahun 2023 harus melibatkan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	76,73	97,84	-21,11
2	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	80	97,06	-17,06

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	2,11	76,73	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah persentase layanan domain</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2022

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang diamankan yang disediakan Dinas Kominfo dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
2	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan</i>	<i>Persentase</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika,
	<i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika,
	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah laporan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika,
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika
	<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur</i>	<i>PD</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2022

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	<i>Persentase perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi keamanan informasi</i>	<i>PD/</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	<i>Persentase perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik</i>	<i>PD</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	<i>Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	<i>PD</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik</i>	<i>Persentase</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100%</i>	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Kehumasan
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Jumlah Bimtek yang terlaksana	<i>orang</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100%</i>	
		2 Jumlah PPID di Kabupaten dan Kota	<i>Perangkat Daerah</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100%</i>	
		3 Jumlah Kegiatan PRAHUM yang terlaksana	<i>persen</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>100%</i>	
		4 Jumlah Sengketa yang diberikan melalui Media Komunikasi Publik	<i>laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	
		5 Jumlah Kerjasama yang diselenggarakan dengan media Publik	<i>media</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100%</i>	
		6 Jumlah Bimtek yang terlaksana Kegiatan	<i>orang</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100%</i>	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Level Maturitas/ indeks kami	<i>Level/indeks kami</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>66,67%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2022

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persen	75	75	100%	
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	PD	22	22	100%	
		2 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Kegiatan Strategis/ Persen	75	75	100%	
		3 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	Sistem Elektronik / Persen	60	60	100%	
		4 Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem Elektronik	30	30	100%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	Persentase	60	70	116,67%	Kabid Statistik

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1 <i>Data Statistik Sosial</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	100%	
		2 <i>Data Statistik Ekonomi</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	100%	
		3 <i>Data Statistik SDA dan Infrastruktur</i>	<i>Dokumen</i>	1	1	100%	

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	2,75	2,11	76,73	87.730.375,101,00	83.881.219,719,00	95,61
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	80	80	100%			

2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran perprogram dan kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7,362,108,000	7,203,081,824	97.84	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi dan Persandian
1.	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	3,371,487,200	3,317,757,537	98.41	



NO	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
			PAGU	REALISASI	% CAPAIAN	
	2.	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	3,990,620,800	3,885,324,287	97.36	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		37,429,086,750	36,998,053,535	98,85	<i>Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan</i>
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	37,429,086,750	36,998,053,535	98,85	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		340,267,000	314,614,535	92.46	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	269,467,000	244,387,950	90.69	
	2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	70,800,000	70,226,585	99.19	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		1,787,473,500	1,770,972,461	99.08	<i>Kabid Statistik</i>
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1,787,473,500	1,770,972,461	99.08	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 . Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2022, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain :

- 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

- 2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 108 Tahun 2023
tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah Tahun 2022



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (*empat ratus lima puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (*seratus tiga*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022

HASIL PEMANTAUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

Hasil Pemantauan SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2,92	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2,60	Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,93	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2,68	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,90	Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3,84	Sangat Baik
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,01	Baik
8	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,32	Baik
9	Kementerian Dalam Negeri	3,63	Sangat Baik
10	Kementerian Pertahanan	2,62	Baik
11	Kementerian Pertanian	3,75	Sangat Baik
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,51	Sangat Baik
13	Kementerian Perhubungan	3,33	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
14	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3,86	Sangat Baik
15	Kementerian Kesehatan	2,94	Baik
16	Kementerian Agama	2,26	Cukup
17	Kementerian Ketenagakerjaan	2,84	Baik
18	Kementerian Sosial	2,28	Cukup
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,73	Baik
20	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,30	Baik
21	Kementerian Perindustrian	2,87	Baik
22	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3,17	Baik
23	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,42	Baik
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3,62	Sangat Baik
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3,55	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	2,87	Baik
2	Lembaga Administrasi Negara	3,57	Sangat Baik
3	Arsip Nasional Republik Indonesia	2,74	Baik
4	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2,96	Baik
5	Perpustakaan Nasional RI	3,51	Sangat Baik
6	Badan Pengawas Obat dan Makanan	3,12	Baik
7	Lembaga Ketahanan Nasional RI	2,57	Cukup
8	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2,69	Baik
9	Badan Narkotika Nasional	2,17	Cukup
10	Badan Keamanan Laut	2,71	Baik
11	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	2,85	Baik
12	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,21	Baik
13	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2,00	Cukup
14	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,05	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Intelijen Negara	3,13	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	2,30	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	2,18	Cukup
2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,77	Baik
3	Dewan Perwakilan Rakyat	2,95	Baik
4	Mahkamah Agung RI	2,61	Baik
5	Badan Pemeriksa Keuangan	2,68	Baik
6	Mahkamah Konstitusi	1,80	Cukup
7	Komisi Yudisial	1,82	Cukup
8	Dewan Perwakilan Daerah	2,18	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Instansi Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2,32	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	2,09	Cukup
2	Radio Republik Indonesia	2,01	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Ketahanan Nasional	2,63	Baik
2	Komisi Pemilihan Umum	2,73	Baik
3	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2,85	Baik
4	Ombudsman Republik Indonesia	3,01	Baik
5	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1,39	Kurang
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1,88	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Komisi Penyiaran Indonesia	2,34	Cukup
8	Komisi Kejaksaan	1,08	Kurang
9	Komisi Aparatur Sipil Negara	3,31	Baik
10	Dewan Pers	1,42	Kurang
11	Dewan Jaminan Sosial Nasional	2,71	Baik
12	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	1,71	Kurang
13	Lembaga Sensor Film	2,14	Cukup
14	Konsil Kedokteran Indonesia	2,03	Cukup
15	Kantor Staf Presiden	2,44	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	2,76	Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,29	Cukup
3	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,63	Baik
4	Pemerintah Kab. Bireuen	2,10	Cukup
5	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,20	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,60	Baik
8	Pemerintah Kota Sabang	1,59	Kurang
9	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,15	Baik
10	Pemerintah Kota Langsa	1,82	Cukup
11	Pemerintah Kota Subulussalam	1,76	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2,81	Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,32	Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,02	Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,62	Kurang
6	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	1,85	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,05	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,39	Cukup
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,68	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	1,49	Kurang
11	Pemerintah Kab. Toba	1,86	Cukup
12	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,58	Cukup
13	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	1,84	Cukup
14	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,40	Cukup
15	Pemerintah Kab. Samosir	2,62	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	1,92	Cukup
17	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,91	Cukup
18	Pemerintah Kab. Batubara	2,18	Cukup
19	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2,04	Cukup
20	Pemerintah Kota Binjai	1,82	Cukup
21	Pemerintah Kota Pematang Siantar	2,35	Cukup
22	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2,30	Cukup
23	Pemerintah Kota Sibolga	1,73	Kurang
24	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	1,95	Cukup
25	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,01	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,22	Cukup
3	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,24	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2,38	Cukup
5	Pemerintah Kab. Siak	2,34	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2,12	Cukup
7	Pemerintah Kota Pekanbaru	2,83	Baik
8	Pemerintah Kota Dumai	2,63	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2,68	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	2,10	Cukup
3	Pemerintah Kab. Natuna	2,50	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1,85	Cukup
5	Pemerintah Kota Batam	2,85	Baik
6	Pemerintah Kota Tanjungpinang	1,85	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,18	Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,38	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	1,91	Cukup
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,12	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,60	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	3,48	Baik
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,21	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
10	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,26	Cukup
11	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,41	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,36	Cukup
13	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,46	Cukup
14	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,81	Baik
15	Pemerintah Kota Sawahlunto	2,84	Baik
16	Pemerintah Kota Solok	2,71	Baik
17	Pemerintah Kota Padang	3,01	Baik
18	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,02	Baik
19	Pemerintah Kota Pariaman	2,64	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	2,19	Cukup
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,04	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,63	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bungo	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Merangin	1,56	Kurang
6	Pemerintah Kab. Kerinci	1,52	Kurang
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,63	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,11	Cukup
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	1,92	Cukup
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,16	Cukup
11	Pemerintah Kota Jambi	2,79	Baik
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	1,97	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2,80	Baik
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,67	Baik
3	Pemerintah Kab. Muara Enim	2,91	Baik
4	Pemerintah Kab. Lahat	2,14	Cukup
5	Pemerintah Kab. Musi Rawas	1,92	Cukup
6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Banyuasin	1,86	Cukup
8	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	1,93	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,52	Cukup
10	Pemerintah Kab. Empat Lawang	1,86	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	1,53	Kurang
12	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,01	Cukup
13	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,45	Cukup
14	Pemerintah Kota Prabumulih	2,62	Baik
15	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,83	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	1,85	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,02	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2,30	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	2,80	Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,01	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	2,70	Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2,22	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,11	Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	2,17	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,31	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	2,80	Baik
5	Pemerintah Kab. Seluma	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,04	Cukup
7	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,13	Cukup
8	Pemerintah Kab. Lebong	1,55	Kurang
9	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,34	Cukup
10	Pemerintah Kota Bengkulu	2,19	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,37	Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,10	Cukup
3	Pemerintah Kab. Lampung Utara	2,43	Cukup
4	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,26	Cukup
5	Pemerintah Kab. Tanggamus	1,60	Kurang
6	Pemerintah Kab. Way Kanan	2,24	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,00	Cukup
9	Pemerintah Kab. Mesuji	2,59	Cukup
10	Pemerintah Kota Metro	2,49	Cukup
11	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,50	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3,67	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,37	Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3,33	Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Cianjur	2,37	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bekasi	1,71	Kurang
6	Pemerintah Kab. Karawang	3,08	Baik
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,28	Cukup
8	Pemerintah Kab. Subang	2,35	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bandung	2,82	Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	3,84	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	2,58	Cukup
12	Pemerintah Kab. Ciamis	2,64	Baik
13	Pemerintah Kab. Cirebon	2,66	Baik
14	Pemerintah Kab. Kuningan	2,88	Baik
15	Pemerintah Kab. Indramayu	3,09	Baik
16	Pemerintah Kab. Bandung Barat	2,65	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangandaran	2,82	Baik
18	Pemerintah Kota Bandung	3,61	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Bogor	2,75	Baik
20	Pemerintah Kota Cirebon	3,17	Baik
21	Pemerintah Kota Bekasi	2,78	Baik
22	Pemerintah Kota Depok	3,42	Baik
23	Pemerintah Kota Cimahi	3,09	Baik
24	Pemerintah Kota Tasikmalaya	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Banjar	2,38	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,03	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	2,64	Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	2,47	Cukup
4	Pemerintah Kab. Lebak	2,63	Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	2,66	Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	2,60	Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,01	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,49	Cukup
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2,54	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	3,02	Baik
2	Pemerintah Kab. Sleman	3,19	Baik
3	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,62	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3,34	Baik
2	Pemerintah Kab. Semarang	2,13	Cukup
3	Pemerintah Kab. Kendal	2,93	Baik
4	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
5	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Batang	2,85	Baik
7	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
8	Pemerintah Kab. Brebes	2,40	Cukup
9	Pemerintah Kab. Kudus	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Pemalang	2,23	Cukup
11	Pemerintah Kab. Jepara	3,14	Baik
12	Pemerintah Kab. Rembang	3,19	Baik
13	Pemerintah Kab. Blora	2,36	Cukup
14	Pemerintah Kab. Banyumas	2,60	Baik
15	Pemerintah Kab. Cilacap	2,87	Baik
16	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,20	Baik
17	Pemerintah Kab. Banjarnegara	2,86	Baik
18	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
19	Pemerintah Kab. Wonosobo	2,90	Baik
20	Pemerintah Kab. Purworejo	2,80	Baik
21	Pemerintah Kab. Kebumen	3,44	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
22	Pemerintah Kab. Sragen	3,10	Baik
23	Pemerintah Kab. Sukoharjo	3,42	Baik
24	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,32	Baik
25	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,34	Baik
26	Pemerintah Kota Semarang	3,38	Baik
27	Pemerintah Kota Salatiga	2,84	Baik
28	Pemerintah Kota Tegal	3,05	Baik
29	Pemerintah Kota Magelang	2,67	Baik
30	Pemerintah Kota Surakarta	3,73	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3,30	Baik
2	Pemerintah Kab. Gresik	3,27	Baik
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	2,29	Cukup
5	Pemerintah Kab. Jombang	2,96	Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	2,10	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sumenep	2,05	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	1,89	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	2,23	Cukup
11	Pemerintah Kab. Situbondo	3,19	Baik
12	Pemerintah Kab. Jember	1,99	Cukup
13	Pemerintah Kab. Malang	2,22	Cukup
14	Pemerintah Kab. Pasuruan	2,04	Cukup
15	Pemerintah Kab. Probolinggo	2,42	Cukup
16	Pemerintah Kab. Lumajang	2,60	Baik
17	Pemerintah Kab. Kediri	2,61	Baik
18	Pemerintah Kab. Tulungagung	2,38	Cukup
19	Pemerintah Kab. Nganjuk	2,18	Cukup
20	Pemerintah Kab. Trenggalek	2,55	Cukup
21	Pemerintah Kab. Blitar	2,61	Baik
22	Pemerintah Kab. Magetan	2,27	Cukup
23	Pemerintah Kab. Ponorogo	2,32	Cukup
24	Pemerintah Kab. Pacitan	2,31	Cukup
25	Pemerintah Kab. Bojonegoro	2,65	Baik
26	Pemerintah Kab. Tuban	2,32	Cukup
27	Pemerintah Kab. Lamongan	2,82	Baik
28	Pemerintah Kota Surabaya	3,69	Sangat Baik
29	Pemerintah Kota Mojokerto	3,32	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
30	Pemerintah Kota Malang	2,60	Baik
31	Pemerintah Kota Pasuruan	2,66	Baik
32	Pemerintah Kota Probolinggo	1,97	Cukup
33	Pemerintah Kota Blitar	2,81	Baik
34	Pemerintah Kota Kediri	2,96	Baik
35	Pemerintah Kota Madiun	2,86	Baik
36	Pemerintah Kota Batu	2,41	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,42	Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,44	Cukup
3	Pemerintah Kab. Sanggau	2,88	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	1,03	Kurang
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,61	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,76	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	1,91	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	1,87	Cukup
9	Pemerintah Kab. Landak	2,13	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sekadau	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Kubu Raya	2,34	Cukup
12	Pemerintah Kab. Kayong Utara	1,88	Cukup
13	Pemerintah Kota Pontianak	3,28	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1,90	Cukup
2	Pemerintah Kab. Barito Utara	1,42	Kurang
3	Pemerintah Kab. Barito Selatan	2,37	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	2,38	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,15	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	1,64	Kurang
7	Pemerintah Kab. Lamandau	2,15	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sukamara	1,84	Cukup
9	Pemerintah Kab. Katingan	2,25	Cukup
10	Pemerintah Kab. Barito Timur	1,71	Kurang
11	Pemerintah Kota Palangka Raya	2,66	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Banjar	2,56	Cukup
2	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tapin	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
5	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabalong	2,00	Cukup
7	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Balangan	2,44	Cukup
10	Pemerintah Kota Banjarmasin	3,31	Baik
11	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,26	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,11	Cukup
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paser	2,13	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,81	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Timur	2,79	Baik
6	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	1,82	Cukup
7	Pemerintah Kota Samarinda	2,44	Cukup
8	Pemerintah Kota Balikpapan	3,05	Baik
9	Pemerintah Kota Bontang	2,70	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1,98	Cukup
2	Pemerintah Kab. Bulungan	2,32	Cukup
3	Pemerintah Kota Tarakan	2,11	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Minahasa	1,80	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,74	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,09	Cukup
6	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	1,51	Kurang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	2,22	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,15	Cukup
10	Pemerintah Kota Manado	1,82	Cukup
11	Pemerintah Kota Bitung	2,57	Cukup
12	Pemerintah Kota Tomohon	1,76	Kurang
13	Pemerintah Kota KotaMogbagu	2,25	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2,48	Cukup
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,03	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bone Bolango	2,30	Cukup
4	Pemerintah Kota Gorontalo	2,59	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,26	Cukup
2	Pemerintah Kab. Poso	1,81	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buol	2,08	Cukup
4	Pemerintah Kab. Morowali	1,97	Cukup
5	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,04	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sigi	1,91	Cukup
7	Pemerintah Kota Palu	1,76	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2,35	Cukup
2	Pemerintah Kab. Wajo	2,51	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bone	2,11	Cukup
4	Pemerintah Kab. Maros	2,04	Cukup
5	Pemerintah Kab. Luwu	2,26	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sinjai	2,07	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bulukumba	1,81	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bantaeng	2,29	Cukup
9	Pemerintah Kab. Jeneponto	2,16	Cukup
10	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	1,83	Cukup
11	Pemerintah Kab. Barru	2,06	Cukup
12	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	2,32	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
13	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,12	Cukup
14	Pemerintah Kab. Soppeng	2,67	Baik
15	Pemerintah Kab. Enrekang	2,65	Baik
16	Pemerintah Kab. Luwu Utara	2,93	Baik
17	Pemerintah Kota Makassar	2,45	Cukup
18	Pemerintah Kota Parepare	2,50	Cukup
19	Pemerintah Kota Palopo	2,90	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1,74	Cukup
2	Pemerintah Kab. Kolaka	3,15	Baik
3	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2,01	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	1,87	Cukup
5	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,02	Cukup
6	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kota Kendari	2,02	Cukup
8	Pemerintah Kota Baubau	1,38	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Mamuju	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,58	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Majene	2,55	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Buleleng	3,03	Baik
2	Pemerintah Kab. Jembrana	2,76	Baik
3	Pemerintah Kab. Karangasem	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Bangli	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Badung	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabanan	2,74	Baik
7	Pemerintah Kota Denpasar	3,68	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi NTB	3,24	Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	2,62	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	2,08	Cukup
4	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,23	Cukup
5	Pemerintah Kab. Dompu	1,20	Kurang
6	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	2,66	Baik
7	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,40	Cukup
8	Pemerintah Kota Mataram	3,16	Baik
9	Pemerintah Kota Bima	1,91	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi NTT	3,35	Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	1,85	Cukup
3	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	1,21	Kurang
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Alor	1,81	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sikka	1,83	Cukup
7	Pemerintah Kab. Flores Timur	1,52	Kurang
8	Pemerintah Kab. Manggarai	1,76	Kurang
9	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,31	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sumba Barat	2,25	Cukup
11	Pemerintah Kab. Rote Ndao	2,48	Cukup
12	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,01	Baik
13	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,46	Cukup
14	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,35	Kurang
15	Pemerintah Kab. Nagekeo	1,14	Kurang
16	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1,25	Kurang
17	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	2,14	Cukup
18	Pemerintah Kab. Malaka	1,99	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,23	Cukup
2	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1,84	Cukup
4	Pemerintah Kota Ambon	2,24	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,47	Cukup
2	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,33	Cukup
3	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	1,71	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,10	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,09	Cukup
3	Pemerintah Kab. Manokwari	1,60	Kurang
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	1,16	Kurang
6	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1,39	Kurang
7	Pemerintah Kota Sorong	1,72	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,61	Baik
3	Pemerintah Kab. Jayawijaya	1,51	Kurang
4	Pemerintah Kab. Keerom	1,39	Kurang
5	Pemerintah Kota Jayapura	1,85	Cukup

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3,43	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,42	Cukup
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1,54	Kurang
3	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	2,77	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,85	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pidie	2,03	Cukup
3	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,62	Kurang
4	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,47	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,13	Kurang
6	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,65	Kurang
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1,62	Kurang
8	Pemerintah Kab. Gayo Lues	1,62	Kurang
9	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,01	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
10	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	1,54	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Simalungun	1,74	Kurang
2	Pemerintah Kab. Nias	2,02	Cukup
3	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1,37	Kurang
4	Pemerintah Kab. Padang Lawas	1,72	Kurang
5	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,79	Kurang
6	Pemerintah Kab. Nias Utara	1,48	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,21	Cukup
2	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,13	Cukup
3	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2,12	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Karimun	1,58	Kurang
2	Pemerintah Kab. Lingga	1,97	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,23	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,25	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Kaur	1,27	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	1,70	Kurang
2	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,09	Cukup
3	Pemerintah Kab. Lampung Timur	1,90	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pesawaran	1,95	Cukup
5	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	1,94	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Melawi	1,27	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Kapuas	1,83	Cukup
2	Pemerintah Kab. Gunung Mas	1,99	Cukup
3	Pemerintah Kab. Murung Raya	1,77	Kurang
4	Pemerintah Kab. Seruyan	1,35	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	2,35	Cukup
2	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	1,76	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Berau	1,97	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Malinau	2,04	Cukup
2	Pemerintah Kab. Nunukan	2,35	Cukup
3	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,06	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	1,64	Kurang
2	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,04	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Boalemo	2,02	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,06	Cukup
3	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	1,55	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Donggala	1,38	Kurang
2	Pemerintah Kab. Tolitoli	1,66	Kurang
3	Pemerintah Kab. Banggai	2,07	Cukup
4	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	1,51	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	1,03	Kurang
6	Pemerintah Kab. Banggai Laut	1,22	Kurang
7	Pemerintah Kab. Morowali Utara	1,67	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Takalar	1,96	Cukup
3	Pemerintah Kab. Luwu Timur	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Toraja Utara	1,77	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Konawe	1,70	Kurang
2	Pemerintah Kab. Buton	1,65	Kurang
3	Pemerintah Kab. Muna	1,38	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bombana	2,08	Cukup
5	Pemerintah Kab. Wakatobi	1,27	Kurang
6	Pemerintah Kab. Konawe Utara	1,61	Kurang
7	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	1,33	Kurang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1,94	Cukup
9	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,53	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Pasangkayu	1,09	Kurang
2	Pemerintah Kab. Mamasa	1,00	Kurang
3	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	1,83	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Lombok Timur	1,91	Cukup
2	Pemerintah Kab. Bima	1,36	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Belu	1,92	Cukup
2	Pemerintah Kab. Ngada	1,31	Kurang
3	Pemerintah Kab. Lembata	1,67	Kurang
4	Pemerintah Kota Kupang	2,05	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1,15	Kurang
2	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,92	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buru	1,34	Kurang
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,02	Cukup
5	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	1,34	Kurang
6	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,14	Kurang
7	Pemerintah Kota Tual	2,05	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,30	Kurang
2	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	1,72	Kurang
3	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1,42	Kurang
4	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	1,55	Kurang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kota Ternate	1,06	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua


No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Merauke	1,06	Kurang
2	Pemerintah Kab. Nabire	1,46	Kurang
3	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,61	Kurang
4	Pemerintah Kab. Mimika	1,83	Cukup
5	Pemerintah Kab. Boven Digoel	1,34	Kurang
6	Pemerintah Kab. Mappi	1,59	Kurang
7	Pemerintah Kab. Yahukimo	1,06	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	1,00	Kurang
9	Pemerintah Kab. Supiori	1,42	Kurang
10	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,42	Kurang
11	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	1,06	Kurang
12	Pemerintah Kab. Intan Jaya	1,06	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama
2. Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMINFO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 32.051.861.684	APBD
2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 31.071.296.750	APBD
3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 6.406.002.759	APBD
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai	Rp 1.255.639.500	APBD
5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 340.267.000	APBD
Jumlah	Rp	71.125.067.693

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Gubernur Kalimantan Timur

DR. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama

Kepala Dinas



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Edi Hermawanto Noor, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama
2. Nama : H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen *Perencanaan*. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA

H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

Pihak Pertama

SEKRETARIS

Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19690303 199103 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG SEKRETARIAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi Perkantoran	Presentase Aset Kantor yang layak fungsi	Persen (%)	100
		Presentase penyusunan dokumen perencanaan dan hasil evaluasi program dan kegiatan tahunan tepat waktu	Persen (%)	100
		Presentase penyempurnaan data base administrasi kepegawaian	Persen (%)	100
2	Terwujudnya penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman	Presentase dokumen evaluasi laporan sesuai dengan pedoman	Persen (%)	100
3	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Jumlah laporan SPJ GU tepat waktu	Bulan	12
		Jumlah SPP dan SPM GU yang tepat waktu	Bulan	12
		Jumlah SPP dan SPM LS yang tepat waktu	Bulan	12

	Kegiatan		Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	304.740.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	11.543.895.682
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	3.750.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	159.690.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	741.209.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	13.864.158.241
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	3.356.452.761
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp	2.077.966.000
	JUMLAH	Rp	32.051.861.684

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Kepala Dinas

H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001

Pihak Pertama

Sekretaris / Kepala Bidang

Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si

Pembina

NIP. 19690303 199103 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ISMAWARDI, SE., ME
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program Kominfo Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama
2. Nama : Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

SEKRETARIS

Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19690303 199103 1 012

Pihak Pertama

KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM

ISMAWARDI, SE., ME
Penata Tingkat I
NIP. 19660620 200701 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan Anggaran	Dokumen	8
2	Terpenuhinya Dokumen Pengendalian dan evaluasi Laporan Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan evaluasi	Dokumen	4

Pihak Kedua

Sekretaris

Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19690303 199103 1 012

Samarinda, Januari 2022

Pihak Pertama

Kasubag. Perencanaan Program


ISMAWARDI, SE., ME
Penata Tingkat I
NIP. 19660620 200701 1 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Besuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agus Priyanto, S.Sos

Jabatan : Kassubag. Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Drs. Edi Hermawanto Noor, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Sekretaris

Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si

Pembina

NIP. 19690303 199103 1 012

Pihak Pertama

Kassubag. Perencanaan

AGUS PRIYANTO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19661009 198903 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN UMUM**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Laporan / Dokumen Ketatausahaan yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan Kehadiran Pegawai	Laporan	1
		2 Laporan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala	Laporan	1
		3 Laporan Inventaris Barang	Laporan	1
		4 Laporan Surat Masuk dan Keluar	Laporan	1
		5 SOP Dinas Kominfo Prov. Kaltim	Dokumen	1
		6 Laporan ANJAB dan ABK	Laporan	1
		7 Laporan Budaya Kerja	Laporan	1
2	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Persentase Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang diadakan Sesuai Perencanaan	Persentase	100
3	Terpeliharanya peralatan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kerja ASN	1 Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Laporan	1
		2 Laporan Aset Diskominfo Prov. Kaltim	Laporan	1
4	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian	1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan	Laporan	1
		2 Laporan Rekapitulasi Perjalanan Dinas	Laporan	1

Sub Kegiatan

Anggaran

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	110.135.000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	17.738.346
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	1.098.305.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	30.468.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	156.925.000
6	Pengadaan Mebel	Rp	27.200.000
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6.000.000
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	422.751.113
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	58.875.000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	3.023.995.449
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp	332.045.900
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	119.660.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	251.100.400

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua
Sekretaris



Drs. EDI HERMAWANTO NOOR, M.Si

Pembina

NIP. 19690303 199103 1 012

Pihak Pertama
Kassubag. Umum



AGUS PRIYANTO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19661009 198903 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : RUDY SYAVITRI, S.E.
Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan Kominfo Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama
2. Nama : ISMAWARDI, S.E, M.E
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program Kominfo Provindi Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kasubag Perencanaan Program,

ISMAWARDI, SE., ME

Penata Tingkat I

NIP. 19660620 200701 1 022

RUDY SYAVITRI, S.E

Penata Tingkat I

NIP. 19660620 200701 1 022



Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN**

No.	Sasaran Aktifitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1	Tersedianya Bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perencanaan	1	Jumlah Laporan hasil rapat persiapan penyusunan program dan kegiatan	Laporan	24
		2	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan	Dokumen	2
		3	Jumlah laporan realisasi kerja dan keuangan yang diinput pada aplikasi TEPR	Laporan	4
		4	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang diinput pada aplikasi SIPD dan FMIS	Dokumen	2
		5	Jumlah ASN yang membuat Pengukuran Kinerja Tahun 2021	ASN	52
		6	Jumlah laporan evaluasi kinerja bulanan pada aplikasi TEPR	Laporan	12

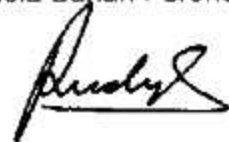
Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Pengelola Bahan Perencanaan

ISMAWARDI, SE., ME
Penata Tingkat I
19660620 200701 1 022

RUDY SYAVITRI, SE
Penata Muda Tingkat I
19750728 200701 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NAMA JABATAN FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fransiskus Xaverius
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Agus Priyanto, S. Sos
Jabatan : Kasubag. Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 01 Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Atasan Jabatan Fungsional /
Jabatan Pelaksana

Pejabat Fungsional / Pelaksana

Agus Priyanto, S. Sos
NIP. 19660910198031012

Fransiskus Xaverius
NIP. 197211022006041008



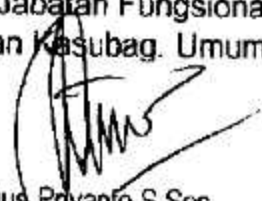
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NAMA JABATAN FUNGSIONAL /JABATAN PELAKSANA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima	12	Berkas	12
2	Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan	12	Kegiatan	12
3	Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dicatat dalam kartu KIR	12	Berkas	12
4	Melakukan pengentrian / pengisian data data belanja modal	12	Kegiatan	12
5	Melakukan pengelolaan kendaraan dinas roda dua (2) dan 4 (empat)	12	Kegiatan	12

Samarinda, 01 Januari 2021

Pihak Kedua

Atasan Jabatan Fungsional /
Jabatan Kasubag. Umum



Agus Priyanto, S.Sos

Penata TK.I. III/d

NIP. 196610091989031012

Pihak Pertama

Pejabat Fungsional
/Pelaksana Administrasi


Fransiskus Xaverius

Pengatur Tingkat I

NIP. 19721102 200604 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NAMA JABATAN FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Mudjiantoro
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Agus Priyanto, S.Sos
Jabatan : Kasubag. Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Samarinda, 01 Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Atasan Jabatan Fungsional /
Jabatan Pelaksana

Pejabat Fungsional / Pelaksana


Agus Priyanto, S.Sos
Penata Tk. I
NIP.19660910198031012


Mudjiantoro
Penata Muda Tk.I,
NIP.19670807 199103 1 016

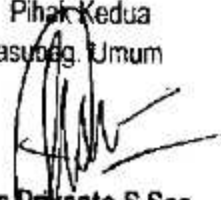
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Jabatan : Administrasi Sarana Prasarana

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana	12	Kegiatan	12
2	Merencanakan kebutuhan Sarana dan Prasarana	12	berkas	12
3	Mengadakan Sarana dan Prasarana	12	berkas	12
4	Menginventaris Sarana dan Prasarana	12	Kegiatan	12
5	Memelihara Sarana dan Prasarana	12	Kegiatan	12
6	Membuat Laporan Penerimaan, Pemakaian dan Stok Of name Barang Persediaan habis Pakai per Semester.	2	berkas	2

Samarinda, 01 Januari 2021.

Pihak Kedua
Kasubag. Umum


Agus Priyanto, S.Sos
Penata TK.I Gol.III/d
NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama
Pelaksana Administrasi Sarana dan


Mudjiantoro
Penata Muda TK.I Gol.III/b
NIP. 19670807 199103 1 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB BAGIAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : La Hali
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Agus Priyanto, S.Sos
Jabatan : Kasubag Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua
Kasub Bagian Umum


Agus Priyanto, S.Sos
Penata Tingkat 1

NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian


LA HALI
Pengatur Muda Tingkat 1

NIP. 19770606 200801 1 021




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tersedianya Dokumen Informasi Kepegawaian	Menghimpun dan memproses berkas administrasi urutan kenaikan pangkat fungsional Umum (JPU) dan fungsional Tertentu (JFT)	Berkas	4
		Menghimpun dan Menyiapkan Berkas administrasi Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Dokumen	27
		Menghimpun dan Memproses Berkas Administrasi Berkas Usulan Pensiun	Dokumen	1
		Menghimpun dan Memproses Usulan Cuti PNS Menggunakan Aplikasi E-Cuti PNS	Berkas	15
		Mengupdate Data PNS Pada Sistem Informasi Kepegawaian	Data	54
		Membuat Laporan Hasil Proses Administrasi yang berkaitan Dengan Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Laporan	54
		Mencatat dan Mendokumentasikan Kegiatan Administrasi yang Berkaitan dengan Kepegawaian	Laporan	54

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua
 Kasub Bagian Umum


AGUS PRIYANTO, S.Sos
 Penata Tingkat 1 (III/d)
 NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama
 Pengadministrasi Kepegawaian


LA HALU
 Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)
 NIP. 19770606 200801 1 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB BAGIAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H a m s i
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Agus Priyanto, S.Sos
Jabatan : Kasubag Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua
Kasub Bagian Umum

Agus Priyanto, S.Sos
Penata Tingkat 1
NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian

H A M S I
Pengatur Tingkat 1
NIP. 19691231 200604 1 061



No.	Sasaran Stra
1	2
	Tersedianya Doku
	Informasi Kepega

Pihak Kedu

Kasub Bagian U



AGUS PRIYANTO

Penata Tingkat I

NIP 19661009 1985

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tersedianya Dokumen Informasi Kepegawaian	Menghimpun dan memproses berkas administrasi urutan kenaikan pangkat fungsional Umum (JPU) dan fungsional Tertentu (JFT)	Berkas	4
		Menghimpun dan Menyiapkan Berkas administrasi Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	Dokumen	27
		Menghimpun dan Memproses Berkas Administrasi Berkas Usulan Pensiun	Dokumen	1
		Menghimpun dan Memproses Usulan Cuti PNS Menggunakan Aplikasi E-Cuti PNS	Berkas	15
		Mengupdate Data PNS Pada Sistem Informasi Kepegawaian	Data	54
		Menbuat Laporan Hasil Proses Administrasi yang berkaitan Dengan Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Laporan	54
		Mencatat dan Mendokumentasikan Kegiatan Administrasi yang Berkaitan dengan Kepegawaian	Laporan	54

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua

Kasub Bagian Umum



AGUS PRIYANTO, S.Sos

Penata Tingkat 1 (III/d)

NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama

Pengadministrasi Kepegawaian



HAMSI
Pengatur Tingkat 1 (II/d)

NIP. 19691231 2006 1 061



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Agus Priyanto, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : Hamidah
Jabatan : Arsiparis Terampil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 21 Januari 2021

Pihak Kedua

KASUBBAG UMUM

Agus Priyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama

ARSIPARIS TERAMPIL

Hamidah
Pengatur
NIP. 19770407 200801 2 022



PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah
Jabatan


: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
: Arsiparis Terampil

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Saluan	Target
1.	Terwujudnya penataan kearsipan yang rapi	Jumlah kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip	Arsip	500
		Jumlah verifikasi autentisitas arsip yang tercipta	Arsip	500
		Jumlah pemberkasan arsip aktif	Arsip	500
		Jumlah penataan dan penyinpahan arsip inaktif	Arsip	300
		Jumlah identifikasi arsip	Arsip	500

No.	Sub Kegiatan
1.	Pemilahan arsip berdasarkan klasifikasi
2.	Pendataan arsip yang akan disimpan
3.	Penyimpanan arsip

Samarinda, 21 Januari 2022

Pihak Kedua
Kasubag Umum


Agus Priyanto, S.Sos
Penata Tingkat I

NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama
Arsiparis Terampil


Hamidah
Pengatur

NIP. 19770407 200801 2 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 NAMA JABATAN FUNGSIONAL/JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ryan Alfani
Jabatan : Arsiparis Terampil
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Agus Priyanto, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 25 Februari 2022

Pihak Kedua

Atasan Jabatan Fungsional / Jabatan
Pelaksana


Agus Priyanto, S.Sos

Penata Tk. I / III.d

NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama

Pejabat Fungsional / Pelaksana


Ryan Alfani, A.Md

Pengatur / II.c

NIP. 19941202 201903 1 008



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NAMA JABATAN FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penataan arsip yang baik	Jumlah surat masuk yang tercatat dan terseleksi	Daftar	1
2.		Jumlah surat masuk yang dialih mediakan dan didistribusikan	Daftar	1
3.		Jumlah daftar arsip aktif yang tercipta	Daftar	1

Samarinda, 25 Februari 2022

Pihak Kedua

Atasan Jabatan Fungsional / Jabatan
Pelaksana


Agus Priyanto, S.Sos

Penata Tk. I / III.d

NIP. 19661009 198903 1 012

Pihak Pertama

Pejabat Fungsional / Pelaksana


Ryan Alfani, A.Md

Pengatur / II.c

NIP. 19941202 201903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUB BAGIAN / SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Irene Yuriantini, S.Hut, MP
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publikasi dan Kehumasan
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kepala Bidang Informasi Komunikasi
Publikasi dan Kehumasan

Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001

Irene Yuriantini, S.Hut, MP
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19720229 199703 2 005



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASI PENGELOLAAN OPINI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

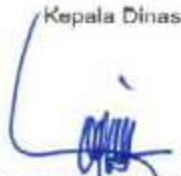
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terselenggaranya Monitoring Isu dan Pengelolaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Laporan	Laporan	3
2	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah Laporan	Laporan	1
3	Terselenggaranya Penguatan Sumberdaya Komunikasi Publik	Jumlah Laporan	Laporan	1
4	Terselenggaranya Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1
5	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Laporan	Laporan	3
6	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP	Jumlah Dokumen	Dokumen	3

	KEGIATAN		ANGGARAN
1	Perumusan Kegiatan Teknis Bidang IKP	Rp	146.640.000
2	Monitoring Isu dan Manajemen Krisis	Rp	455.070.000
3	Layanan Humas, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp	24.942.886.000
4	Tata Kelola Komisi Informasi Daerah	Rp	2.172.190.250
5	Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp	110.936.000
6	Pengelolaan Informasi Publik	Rp	3.243.574.500

Samarinda, Januari 2022


Pihak Kedua

Kepala Dinas


Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Informasi Komunikasi
Publik dan Kehumasan


Irene Yuriantini, S.Hut., MP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19720229 199703 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Arminiwati, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : **Irene Yuriantini, S.Hut, MP**
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Kepala Bidang Informasi Komunikasi
Publik dan Kehumasan

Irene Yuriantini, S. Hut, MP

Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19720229 199703 2 005

Pihak Pertama

Kepala Seksi Monitoring Opini &
Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Arminiwati, SE

Penata Tingkat I/III d
NIP. 19710815 200212 2 010

PERJANJIAN KINERJA 2022

Perangkat Daerah
Jabatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Memfasilitasi Seminar Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan seminar	Orang	50
2	Melaksanakan kegiatan Monitoring Diseminasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Berita yang menyebarluaskan agenda prioritas Pemerintah Daerah	Berita	2500
3	Melaksanakan Publikasi Agenda Prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah berita yang menyebarluaskan kegiatan pemerintah daerah	Berita	500
4	Melaksanakan Kerjasama dengan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang menyebarluaskan kegiatan pemerintah daerah	Media	30
5	Melaksanakan Kerjasama dengan Media Elektronik	Jumlah Kerjasama Media Elektronik	Dokumen	2
6	Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	50

KEGIATAN		ANGGARAN
1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	146.640.000
2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp	171.900.000
3 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp	146.970.000
4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp	23.733.710.000
5 Layanan Hubungan Media	Rp	218.592.000
6 Manajemen Komunikasi Krisis	Rp	124.200.000

Samarinda, Januari 2022

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Kasi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik


Irene Yuriantini, S. Hut, MP
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19720229 199703 2 005


Arminiwati, SE
Penata Tingkat I/III d
NIP. 19710815 200212 2 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUB BAGIAN / SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Awang Fauzan Rahman, S.Sos., MM
Jabatan : Kasi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

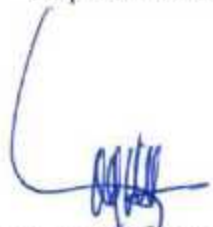
Samarinda, Januari 2022


Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas

Kasie Kemitraan Informasi dan
Komunikasi Publik


Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001


Awang Fauzan Rahman, S.Sos., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850219 201001 1 007



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim
 Jabatan : Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral	Jumlah informasi kebijakan pemerintah daerah	Laporan	300
2	Menyusun rencana kerja dan kegiatan dilingkup seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas	Jumlah kegiatan yang menginformasikan kebijakan kebudayaan pemerintah daerah melalui pameran	Laporan	2

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	penyediaan konten melalui jumlah poster, leaflet, spanduk dll	Rp 159.500.000
2	partisipasi pada kegiatan pameran/pekan kebudayaan daerah di dalam maupun diluar daerah serta kegiatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota & Kegiatan Bakohumas	Rp 151.828.000
TOTAL		Rp 311.328.000

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Kabid IKP dan Kehumasan




IRENE YURIANTINI, S.Hut., MP

Pembina

NIP. 19720229 199703 2 005

Pihak Pertama

Kasi Kemitraan Informasi dan
Komunikasi Publik



AWANG FAUZAN RAHMAN, S.Sos., MM

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19850219 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN Penguatan KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : A. Abd. Razaq, S.S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : Muhammad Faisal, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Dinas

MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi

A.ABD.RAZAQ, S.S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720305 200112 1 005



DISKOMINFO
KALIMANTAN

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PenguATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fungsi dan peran PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan Kab/Kota yang memiliki PPID	Perangkat Daerah (PD)	50 (PD dan Biro)
2	Meningkatnya kualitas sumber daya Pranata Hubungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur	Presentasi Sumber Daya Pranata Humas yang dibina di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	%	85%
3	Meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR dan terselenggaranya hubungan media dan komunitas	Jumlah informasi yang disebarluaskan oleh Media kepada publik	Laporan	2 Laporan
4	Terlaksananya dukungan administratif keuangan dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kegiatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1 Laporan
5	Terlaksananya kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Laporan	1 Laporan

Sub Kegiatan

1. Pelayanan Informasi Publik (Hibah KPID)
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Anggaran

Rp 3.243.574.500,-
 Rp 110.936.000,-
 Rp 392.184.000,-
 Rp 2.172.190.250,-

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua
 Kepala Dinas

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi

MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680805 199402 1 001

A.ABD.RAZAQ, S.S.H., M.H
 Pembina
 NIP. 19720305 200112 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Syahrudin
Jabatan : Pengolah Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : A. Abd. Razaq, S.S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Seksi

A.ABD.RAZAQ,S.S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19840327 201001 2 014

Pihak Pertama,
Pengolah Informasi dan Komunikasi
Publik,


SYAHRUDDIN
Penata Muda
NIP. 19700507 200212 1 014



DISKOMINFO
KALTIM

Membangun Bersama Dengan Keterbukaan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PRANATA HUMAS AHLI MUDA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Jumlah Berita yang diupload	Berita	2000
2	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kerjasama yang diselenggarakan dengan media publik	Laporan	1
3	Meningkatnya Monitoring Opini Melalui Media Massa dan Media Sosial	Jumlah Laporan Monitoring Opini Melalui Media Massa dan Media Sosial	Laporan	40

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bidang IKP dan Kehumasan

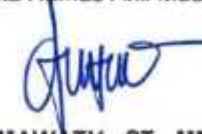


IRENE YURIANITINI., S.Hut., MP

Pembina Tingkat I

NIP 19720229 199703 2 005

Pihak Pertama
Pranata Humas Ahli Muda



SUKMAWATY., ST., MM

Penata Muda Tingkat I

NIP 19770219 201406 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dra. Hj. Normalina, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : **H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA DINAS
KOMINFO PROV. KALTIM,

H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680805 199402 1 001

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA,

Dra. Hj. NORMALINA, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651223 198603 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.	Laporan	1
2	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Laporan	1
3	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Jumlah Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Laporan	1
4	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Jumlah Laporan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Laporan	1
5	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. - Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.	Rp. 350.886.000
2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. - Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik. - Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. - Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.	Rp. 285.256.000 Rp. 130.533.500 Rp. 103.501.500 Rp. 274.808.000

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim,



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680805 199402 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Aplikasi Informatika,



Dra. Hj. NORMALINA, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651223 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Noor Fitriantono, ST
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama : Dra. Hj. Normalina, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Kabid Aplikasi Informatika

Dra. Hj. NORMALINA, M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 196512231986032009

Pihak Pertama

Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK

NOOR FITRIANTONO, ST
Penata / III.c
NIP. 19760921 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Tersosialisasikannya UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik dan tersampainya transfer pengetahuan kepada peserta pelatihan	Jumlah laporan kegiatan pelatihan	Laporan	1
2.	Terlaksananya penerbitan Sertifikat Elektronik bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah laporan kegiatan penerbitan Sertifikat Elektronik	Laporan	1
3.	Tersosialisasikannya tata cara dan peraturan perundang-undangan terkait Penetapan Angka Kredit (PAK) JF Pranata Komputer Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah laporan kegiatan	Laporan	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp. 274.808.000,00

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Bidang Aplikasi Informatika,



Dra. Hj. NORMALINA, M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19651223 198603 2 009

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pengembangan
Sumber Daya TIK,



NOOR FITRIANTONO, ST
Penata / III.c
NIP. 19760921 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fery, S.Kom, M.Si**
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : **Dra. Hj. Normalina, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG
APLIKASI INFORMATIKA,

Dra. Hj. NORMALINA, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651223 198603 2 009

Pihak Pertama

PRANATA KOMPUTER
AHLI MUDA,

FERY, S.Kom, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810227 201001 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA**

No	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi	Jumlah rencana yang disusun	Dokumen	3 dokumen
2.	Mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi	Jumlah aset dan konfigurasi layanan TI yang dikelola	Dokumen	4 dokumen
3.	Melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi	Jumlah pengujian yang dilakukan	Dokumen	2 dokumen
4.	Melakukan analisis kebutuhan informasi	Jumlah analisis	Dokumen	2 dokumen
5.	Melakukan pengembangan Profesi	Jumlah pengembangan Profesi	Dokumen	2 dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Aplikasi Informatika,



Dra. Hj. Normalina., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196512231986032009

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Muda,



Fery., S.Kom., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198102272010011017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN PERSANDIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Dianto, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang TIK dan Persandian
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kadis Kominfo Prov. Kaltim


H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
NIP. 196808051994021001

Pihak Pertama

Kabid. TIK & Persandian


Drs. Dianto, M.Si.
NIP. 196604131997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya layanan TIK untuk pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Persen	62,5
2	Terselenggaranya layanan TIK untuk pengelolaan domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang diamankan yang disediakan Dinas Kominfo dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	75
3	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi Kalimantan Timur	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persen	60
4	Terselenggaranya kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	Persentase sistem elektronik yang dimiliki pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur yang telah menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Persen	60

No.	Kegiatan		Anggaran
1	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	2.609.021.800,-
2	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	3.020.601.200,-
3	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp.	70.800.000,-
4	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	269.467.000,-

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kadis Kominfo. Prov. Kaltim


H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
 NIP. 196808051994021001

Pihak Pertama

Kabid. TIK & Persandian


Drs. Dianto, M.Si.
 NIP. 196604131997031004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKSI INFRASTRUKTUR TIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Eva Yusefa, ST., MM
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur TIK
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Drs. Dianto, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang TIK dan Persandian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kabid TIK & Persandian

Drs. Dianto, M.Si.
NIP. 196604131997031004

Pihak Pertama

Kasi Infrastruktur TIK

Eva Yusefa, ST., MM
NIP. 198309292009032003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI INFRASTRUKTUR TIK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah provinsi	PD	28
2	Terselenggaranya sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah daerah	PD	28

No.	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Pengelolaan Pusat Pemerintahan daerah	data	Rp. 2.194.471.800
2	Sistem Jaringan Pemerintah Daerah	Intra	Rp. 3.020.601.200

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kabid TIK & Persandian



Drs. Dianto, M.Si
NIP. 196604131997031004

Pihak Pertama

Kasi Infrastruktur TIK



Eva Yusefa, ST., MM
NIP. 198309292009032003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fahmy Asa, S.I.P., M.Eng.
Jabatan: Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Drs. Dianto, M.Si.
Jabatan: Kepala Bidang TIK dan Persandian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kabid TIK & Persandian

Drs. Dianto, M.Si.
NIP. 196604131997031004

Pihak Pertama

Kasi Pengelolaan Data & Integrasi SI

Fahmy Asa, S.I.P., M.Eng.
NIP. 197806092008031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Perangkat Daerah di lingkup pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	OPD	22
2	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah provinsi Kalimantan Timur	Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi ke dalam sistem penghubung layanan	OPD	22

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Rp. 138.220.000,-
2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Rp. 126.537.500,-

Samarinda, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kabid TIK & Persandian



Drs. Dianto, M.Si
NIP. 196604131997031004

Pihak Pertama

Kasi. Peng. Data & Integrasi SI



Fahmy Asa, S.I.P., M.Eng
NIP. 197806092008031002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riko Aji Prabowo
Jabatan : Pengendali Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eva Yusefa, ST
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur TIK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 11 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Seksi Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Eva Yusefa, ST
Penata Tk.I/III.d
Nip. 19830929 200903 2 003

Pihak Pertama
Pengendali Teknologi Informasi

Riko Aji Prabowo
Penata/III.c
Nip. 197911112011011001



DISKOMINFO
KALTIM

Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Maju

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

No.	Sasaran Aktivitas	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terfasilitasinya Hosting, Colocation, Cloud Computing bagi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menempatkan aplikasi/Website pada Pusat Data	Perangkat Daerah	21
2	Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Layanan Pusat Data	Jumlah Dokumen pembelian/pemeliharaan pusat Data Daerah	Dokumen	4
3	Tersedianya layanan akses internet terpadu dari pusat data	Prosentase Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	Persen	75
4	Tersedianya kebutuhan Jaringan Intra Pemerintah daerah yang terhubung dalam simpul jaringan TIK	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Perangkat Daerah	24
5	Tersedianya akses jaringan internet pedesaan	Jumlah akses internet pedesaan	Laporan	1

Samarinda, 11 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Seksi Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi



Eva Yusefa, ST
Penata Tk.I/III.d
Nip. 19830929 200903 2 003

Pihak Pertama
Pengendali Teknologi Informasi



Riko Aji Prabowo
Penata/III.c
Nip. 197911112011011001



DISKOMINFO
KALTIM

Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Maju

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim
Bidang/Bagian : Statistik
Subbid/Subbag : -
Tahun : 2021

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistik sosial	Data Statistik Sosial	Dokumen	1	1	100%
2.	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistik ekonomi	Data Statistik Ekonomi	Dokumen	1	1	100%
3.	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistik SDA dan infrastruktur	Data Statistik SDA dan Infrastruktur	Dokumen	1	1	100%

Pihak Kedua
Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001

Samarinda, Januari 2022
Pihak Pertama
Kepala Bidang Statistik,



H. M. ADRIE DIRGA S., S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19761126 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
 Jabatan : Kepala Seksi Statistik Sosial

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menyusun Rencana Kerja seksi Statistik Sosial	Rencana Kerja Statistik Sosial	Dokumen	1
2.	Meningkatkan pengelolaan data Statistik Sektoral di lingkungan Pemprov. Kaltim	1 Jumlah buku Statistik sektoral 2 Jumlah Survei 3 Tersedianya Sistem Informasi data Statistik Sektoral	Buku Laporan Aplikasi	3 2 1
3.	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding- lapangan	Pemahaman materi pengembangan kompetensi yang telah diikuti	Sertifikat	1

Sub Kegiatan

- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Anggaran

Rp. 115.200.000,-
Rp. 195.893.000,-

Samarinda, 5 Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Kabid Statistik


H.M. ADRIE DIRGA SAGITA, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19761126 200003 1 003

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Pertama


IKA WAHYUNI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700718 200604 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nadia Paramitha Nazmah, S.T.
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : Ika Wahyuni, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Statistik Sosial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Seksi Statistik Sosial,

Pranata Komputer Ahli Pertama,

IKA WAHYUNI, S.E.

NADIA PARAMITHA NAZMAH, S.T.

Penata Tingkat I

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19700718 200604 2 012

NIP. 19901125 201503 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama


NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi	Data teknis statistik sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Dokumen	1
2.	Melakukan validasi kebutuhan informasi	Evaluasi kebutuhan informasi terhadap data teknis statistik sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1
3.	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding- lapangan	Pemahaman materi pengembangan kompetensi yang telah diikuti	Sertifikat	1

Aktivitas / Proses

1. Mengumpulkan data teknis statistik sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Melakukan evaluasi kebutuhan informasi terhadap data teknis sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua
 Kepala Seksi Statistik Sosial,



IKA WAHYUNI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19700718 200604 2 012

Pihak Pertama
 Pranata Komputer Ahli Pertama,



NADIA PARAMITHA NAZMAH, S.T.
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19901125 201503 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PRANATA KOMPUTER

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Nazarruddin, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama.
2. Nama : H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Statistik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Statistik

Pranata Komputer Ahli Pertama

H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si

Nip. 19761126 200003 1 003

Nazarruddin, S.Kom

Nip. 19850811 201101 1 001

LAMPIRAN 3
Laporan Keuangan Dan Fisik Diskominfo pada TEPR
Tahun 2022

Laporan Keuangan Dan Fisik

[2.16.2.20.2.21.01.0000] Dinas Komunikasi dan Informatika

Semua

Keterangan : 0-24.99% 25-49.99% 50-99.99% 100%

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,730,375,101.00	47,210,484,091.00	36,670,735,628.00	83,881,219,719.00	95.61%	H	54.81%	42.09%	96.91%	H
2.16.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40,811,439,851.00	22,140,683,116.00	15,453,814,248.00	37,594,497,364.00	92.12%	H	55.56%	38.12%	93.68%	H
2.16.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304,740,000.00	82,180,000.00	200,146,322.00	282,326,322.00	92.64%	H	28.74%	71.26%	100%	H
2.16.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200,760,000.00	70,100,000.00	115,896,000.00	185,996,000.00	92.65%	H	100%	100%	100%	B
2.16.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103,980,000.00	12,080,000.00	84,250,322.00	96,330,322.00	92.64%	H	100%	100%	100%	B
2.16.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,307,088,790.00	0.00	10,332,960,415.00	10,332,960,415.00	77.65%	H	0%	80.72%	80.72%	H
2.16.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,830,808,790.00	0.00	9,874,320,415.00	9,874,320,415.00	76.96%	H	0%	80%	80%	H
2.16.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	476,280,000.00	0.00	458,640,000.00	458,640,000.00	96.30%	H	0%	100%	100%	B
2.16.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	M	0%	0%	0%	M
2.16.001.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	M	0%	0%	0%	M
2.16.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159,630,000.00	111,599,000.00	48,000,000.00	159,599,000.00	99.98%	H	69.93%	30.07%	100%	B
2.16.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111,630,000.00	111,599,000.00	0.00	111,599,000.00	99.97%	H	100%	0%	100%	B
2.16.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	100%	B	0%	100%	100%	B

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,311,857,000.00	35,177,500.00	1,275,124,315.00	1,310,301,815.00	99.88%	H	2.79%	97.21%	100%	B
2.16.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,078,000.00	9,077,500.00	0.00	9,077,500.00	99.99%	H	100%	0%	100%	B
2.16.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,432,000.00	20,052,000.00	0.00	20,052,000.00	93.56%	H	100%	0%	100%	B
2.16.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,400,000.00	0.00	90,337,150.00	90,337,150.00	99.93%	H	0%	100%	100%	B
2.16.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,190,947,000.00	6,048,000.00	1,184,787,165.00	1,190,835,165.00	99.99%	H	100%	100%	100%	B
2.16.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,361,427,500.00	20,877,945,500.00	388,971,300.00	21,266,916,800.00	99.56%	H	99.98%	0%	99.98%	H
2.16.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,370,072,000.00	1,335,410,000.00	0.00	1,335,410,000.00	97.47%	H	100%	0%	100%	B
2.16.001.1.07.005	Pengadaan Mebel	367,564,000.00	367,457,000.00	3,411,000.00	364,046,000.00	99.04%	H	100%	0%	100%	B
2.16.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,623,791,500.00	19,175,078,500.00	392,382,300.00	19,567,460,800.00	99.71%	H	100%	0%	99.98%	H
2.16.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,356,452,761.00	346,350,916.00	2,950,939,672.00	3,297,290,588.00	98.24%	H	10.66%	89.32%	99.98%	H
2.16.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,740,000.00	0.00	7,881,000.00	7,881,000.00	73.38%	H	0%	95%	95%	H
2.16.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357,805,241.00	346,350,916.00	0.00	346,350,916.00	96.80%	H	100%	0%	100%	B
2.16.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,400,000.00	0.00	38,170,000.00	38,170,000.00	96.88%	H	0%	100%	100%	B
2.16.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,948,507,520.00	0.00	2,904,888,672.00	2,904,888,672.00	98.52%	H	0%	100%	100%	B
2.16.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,006,493,800.00	687,430,200.00	257,672,224.00	945,102,424.00	93.90%	H	72.02%	27.56%	99.58%	H
2.16.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277,341,800.00	0.00	257,672,224.00	257,672,224.00	92.91%	H	0%	100%	100%	B

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398,452,000.00	395,000,000.00	0.00	395,000,000.00	99.13%	H	100%	0%	99.36%	H
2.16.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330,700,000.00	292,430,200.00	0.00	292,430,200.00	88.43%	H	100%	0%	99.49%	H
2.16.002	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	37,429,086,750.00	18,308,832,425.00	18,689,221,110.00	36,998,053,535.00	98.85%	H	49.54%	50.14%	99.68%	H
2.16.002.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	37,429,086,750.00	18,308,832,425.00	18,689,221,110.00	36,998,053,535.00	98.85%	H	49.54%	50.14%	99.68%	H
2.16.002.1.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	146,640,000.00	18,440,000.00	121,757,476.00	140,197,476.00	95.61%	H	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	171,900,000.00	6,900,000.00	165,000,000.00	171,900,000.00	100%	B	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	146,970,000.00	24,028,000.00	113,583,380.00	137,611,380.00	93.63%	H	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	362,972,000.00	338,139,875.00	20,907,150.00	359,047,025.00	98.92%	H	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	29,509,440,000.00	17,081,902,500.00	12,368,622,893.00	29,450,525,393.00	99.80%	H	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.006	Pelayanan Informasi Publik	3,350,864,500.00	102,445,500.00	3,223,801,331.00	3,326,246,831.00	99.27%	H	99.86%	100%	100%	H
2.16.002.1.01.007	Layanan Hubungan Media	218,592,000.00	44,491,000.00	153,217,912.00	197,708,912.00	90.45%	H	96.81%	95%	95.40%	H
2.16.002.1.01.008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	427,178,000.00	180,779,000.00	237,752,900.00	418,531,900.00	97.98%	H	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.009	Manajemen Komunikasi Krisis	136,200,000.00	87,632,550.00	22,000,000.00	109,632,550.00	80.49%	H	100%	95%	98.34%	H
2.16.002.1.01.010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	207,136,000.00	79,245,000.00	121,692,320.00	200,937,320.00	97.01%	H	100%	100%	100%	B
2.16.002.1.01.011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2,272,190,250.00	183,103,000.00	1,832,083,189.00	2,015,186,189.00	88.69%	H	100%	95%	95.42%	H

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.002.1.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	479,004,000.00	161,726,000.00	308,802,559.00	470,528,559.00	98.23%	H	98.85%	100%	99.61%	H
2.16.003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7,362,108,000.00	5,708,005,100.00	1,495,076,724.00	7,203,081,824.00	97.84%	H	78.74%	21.08%	99.81%	H
2.16.003.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3,371,487,200.00	2,701,775,000.00	615,982,537.00	3,317,757,537.00	98.41%	H	81.36%	18.64%	100%	B
2.16.003.1.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	350,886,000.00	85,780,000.00	264,359,437.00	350,139,437.00	99.79%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3,020,601,200.00	2,615,995,000.00	351,623,100.00	2,967,618,100.00	98.25%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3,990,620,800.00	3,006,230,100.00	879,094,187.00	3,885,324,287.00	97.36%	H	76.52%	23.13%	99.65%	H
2.16.003.1.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	872,756,000.00	547,903,900.00	314,491,834.00	862,395,734.00	98.81%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.02.002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	130,533,500.00	0.00	113,131,375.00	113,131,375.00	86.67%	H	0%	100%	89.45%	H
2.16.003.1.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2,194,471,800.00	2,060,902,200.00	92,731,167.00	2,153,633,367.00	98.14%	H	100%	100%	100%	H
2.16.003.1.02.004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	93,900,000.00	38,864,000.00	44,771,800.00	83,635,800.00	89.07%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.02.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	55,892,500.00	34,188,000.00	20,937,960.00	55,125,960.00	98.63%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.02.006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	138,220,000.00	45,720,000.00	87,945,151.00	133,665,151.00	96.70%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	103,501,500.00	99,226,000.00	3,528,000.00	102,754,000.00	99.28%	H	100%	100%	100%	B
2.16.003.1.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	126,537,500.00	73,926,000.00	46,632,100.00	120,558,100.00	95.27%	H	100%	100%	100%	B

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.003.1.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	274,808,000.00	105,500,000.00	154,924,800.00	260,424,800.00	94.77%	H	100%	100%	100%	B
2.20.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1,787,473,500.00	879,133,800.00	891,838,661.00	1,770,972,461.00	99.08%	H	49.74%	50.26%	100%	B
2.20.002.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1,787,473,500.00	879,133,800.00	891,838,661.00	1,770,972,461.00	99.08%	H	49.74%	50.26%	100%	B
2.20.002.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	224,871,500.00	98,390,400.00	125,476,300.00	223,866,700.00	99.55%	H	100%	100%	100%	B
2.20.002.1.01.002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	115,200,000.00	36,000,000.00	78,369,200.00	114,369,200.00	99.28%	H	100%	100%	100%	B
2.20.002.1.01.003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	318,130,000.00	232,876,500.00	80,450,000.00	313,326,500.00	98.49%	H	100%	100%	100%	B
2.20.002.1.01.004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	502,409,000.00	99,123,000.00	401,693,161.00	500,816,161.00	99.68%	H	100%	100%	100%	B
2.20.002.1.01.005	Pengembangan Infrastruktur	626,863,000.00	412,743,900.00	205,850,000.00	618,593,900.00	98.68%	H	100%	100%	100%	B
2.21.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	340,267,000.00	173,829,650.00	140,784,885.00	314,614,535.00	92.46%	H	53.99%	46.01%	100%	B
2.21.002.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	269,467,000.00	173,829,650.00	70,558,300.00	244,387,950.00	90.69%	H	68.17%	31.83%	100%	B
2.21.002.1.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	68,418,000.00	50,000,000.00	7,796,100.00	57,796,100.00	84.47%	H	100%	100%	100%	B
2.21.002.1.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	56,064,000.00	18,000,000.00	33,892,900.00	51,892,900.00	92.56%	H	100%	100%	100%	B
2.21.002.1.01.003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	80,964,000.00	61,585,650.00	16,273,300.00	77,858,950.00	96.16%	H	100%	100%	100%	B
2.21.002.1.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	64,021,000.00	44,244,000.00	12,596,000.00	56,840,000.00	88.78%	H	100%	100%	100%	B

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan					Realisasi Fisik			
			Penyedia (Rp)	Swakeelola & Non Pengadaan (Rp)	Total (Rp)	Persen (%)	Status	Penyedia (%)	Swakeelola & Non Pengadaan (%)	Total (%)	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.002.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	70,800,000.00	0.00	70,226,585.00	70,226,585.00	99.19%	H	0%	100%	100%	B
2.21.002.1.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	70,800,000.00	0.00	70,226,585.00	70,226,585.00	99.19%	H	0%	100%	100%	B

Aplikasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran	Jenis Anggaran PERUBAHAN	Tahun Anggaran 2022	Jam 18:24:52	Tidak Ada Jadwal
---	--------------------------	---------------------	--------------	------------------

LAMPIRAN 4

Laporan Kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Tahun 2022

LAPORAN KEGIATAN SEKSI PELAYANAN INFORMASI

TAHUN 2022





DISKOMINFO
KALTIM



LAPORAN PANJI PANJI KEBERHASILAN BIDANG IKP DAN KEHUMASAN TAHUN 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim

JL. BASUKI RAHMAT NO.41 SAMARINDA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup	3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

11.1 Metode Pelaksanaan	4
11.2 Self Assesment Questionnaire (SAQ)	4
11.3 Bobot Penilaian	8
11.4 Pembentukan Tim Penilai	9

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

111.1 Presentasi Kabupaten/Kota	10
111.2 Visitasi Kabupaten/Kota	11
111.3 Hasil Penilaian	14

BAB IV PENUTUP



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan keterbukaan informasi panji keberhasilan informasi komunikasi publik dan kehumasan di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2022. . Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan dalam bidang informasi komunikasi publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan pada tahun-tahun selanjutnya. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini



Samarinda, Desember 2022

Kepala Dinas,

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19680805 199402 1 001

I. PENDAHULUAN



I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyambut HUT Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari tahun 2023, sebagai bentuk apresiasi kepada 10 Kabupaten/ Kota di Kaltim dalam geliat pembangunan, maka Provinsi Kaltim akan memberikan penghargaan diantaranya dalam Bidang Informasi, Komunikasi Publik.

Urusan Bidang IKP merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang merupakan urusan konkuren dari Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkominfo No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Monitoring dan Evaluasi sebagai pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika dilakukan dengan program penguatan manajemen Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk memastikan pemanfaatan informasi komunikasi publik dan kehumasan dapat dilakukan secara maksimal.

Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada kepala daerah untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pembenahan penyelenggaraan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

Dengan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

I. PENDAHULUAN



I.2 DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 3452);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12)
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8);

I. PENDAHULUAN



I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan guna mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan konkuren bidang informasi komunikasi publik dan kehumasandi lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

I.4 MANFAAT

Monitoring dan Evaluasi Panji-panji Keberhasilan adalah untuk mengetahui proses dan hasil terhadap penyelenggaraan Bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

I.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi panji keberhasilan bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan adalah seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

- Diskominfo Kota Samarinda
- Diskominfo Kota Bontang
- Diskominfo Kota Balikpapan
- Diskominfo Kabupaten Kutim
- Diskominfo Kabupaten Kukar
- Diskominfo Kabupaten PPU
- Diskominfo Kabupaten Paser
- Diskominfo Kabupaten Kubar
- Diskominfo Kabupaten Berau
- Diskominfo Kabupaten Mahulu

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1 METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Moitoring dan Evaluasi menggunakan 3 metode yaitu :

- Penyebaran kuesioner (Self Assessment Questionnaire / SAQ) melalui google drive
- Evaluasi lanjutan berupa presentasi dan wawancara via zoom meeting.
- Visitasi ke 5 Kabupaten/Kota yang memiliki bobot nilai tertinggi dari hasil presntasi dan wawancara.

II.2 SELF ASSEEMENT QUESTIONNAIRE / SAQ

Pelaksanaan Moitoring dan Evaluasi dengan 7 item nilai bobot:

1. Jenis Sub Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di Bidang IKP?

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP
- Monitoring Opini Pubik dan Aspirasi Publik
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
- Dukungan Administrasi Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

2. Anggaran Sub Kegiatan apa saja yang sudah tercover yang menjadi urusan IKP pada tahun anggaran 2022?

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP
- Monitoring Opini Publik dan Aspirasi Publik
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan melalui sub kegiatan IKP?

- Terkait Perumusan Kebijakan Teknis Bidang IKP
 - Adakah bentuk Sosialisasi Peraturan terkait Kebijakan urusan IKP?
 - Apakah layanan pengaduan SP4N Lapor aktif pada tahun 2022?
 - Berapa jumlah laporan pengaduan yang masuk pada tahun 2022?
 - Berapa jumlah laporan pengaduan yang sudah ditindak lanjuti pada tahun 2022?
 - Tahapan apa yang sudah dilakukan oleh Tim Lapor Kabupten/ Kota? (misalnya sudah punya SOP)
- Terkait Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda
 - Adakah penetapan Agenda Prioritas Pemda berdasarkan hasil Monitoring Informasi?
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Adakah media yang dikelola IKP?
 - Media apa saja? Baik punya Pemda maupun berbayar.

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Terkait Pelayanan Informasi Publik**
 - Apakah SK PPID masih berlaku tahun 2022 dan sudah sesuai Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ?
 - Apakah Dinas Kominfo Kab/ Kota sudah melakukan Sosialisasi PPID di lingkungan Pemda tahun 2022?
 - Apakah Website dan Media Sosial PPID aktif ?
 - Adakah inovasi sistem informasi untuk PPID secara digital?
 - Berapa jumlah permintaan informasi publik yang sudah masuk di PPID ?
 - Apakah PPID Kab/Kota sudah menetapkan SOP Pelayanan Informasi Publik ? Jika ada mohon unggah gambar pada keterangan
- **Terkait Layanan Hubungan Media**
 - Apakah Kab/ Kota memiliki Media Center?
 - Apakah urusan Kehumasan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota?
 - Apakah sudah melakukan fungsi kehumasan seperti melakukan Jumpa Pers?
 - Apakah Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota sudah membina KIM di desa/ kelurahan?
 - Berapa jumlah KIM yang aktif dan memiliki SK Kepala Desa/ Kelurahan?
 - Apakah ada penghargaan KIM terbaik di Kab/Kota ? Jika ada, mohon untuk di unggah di Keterangan :

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Terkait Manajemen Komunikasi Krisis
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
 - Apakah Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota pernah melakukan bimtek bagi sumberdaya komunikasi publik di lingkup Pemda?
 - Jika pernah mengikut sertakan Bimtek Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik yang diselenggarakan Provinsi Kaltim dan Kementerian Kominfo RI serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kab./ Kota, sudah berapa kali mengikuti dan berapa orang yang pernah ikut tahun 2022?

4. Penghargaan

- Jenis Penghargaan yang pernah diraih di tahun 2022?

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

II.3 BOBOT PENILAIAN

Pelaksanaan Moitoring dan Evaluasi dengan 7 item nilai bobot:

**BOBOT PENILAIAN KEBERHASILAN BIDANG IKP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA se-KALIMANTAN TIMUR**

NO	PENILAIAN	NILAI BOBOT
1	<u>Komitmen Pimpinan Termasuk Penganggaran</u>	25%
2	<u>Kesiapan Termasuk Keynote Speaker</u>	15%
3	<u>Seksi Pelayanan Informasi</u>	
a	PPID	15%
b	SP4N-LAPORI	15%
c	<u>Kehumasan</u>	10%
	<u>Seksi Monitoring Opini & Pengelolaan Media</u>	
a	Media	10%
	<u>Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik</u>	
a	KIM	10%

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

II.4 TIM PENILAI

Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Panji Keberhasilan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 480/K.729/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Susunan Tim Penilai adalah sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Pengarah: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang IKP dan Kehumasan
- Wakil Ketua : Andi Abd. Razaq, S., SH.,M.H.
- Sekretaris : Dr.Silviana Purwanti, S.Sos, M.Si (Akademisi Universitas Mulawarman)

Anggota

- Arminiwati, S.E.
- Awang Fauzan Rahman, S.Sos., M.Si.
- Agus Eko Santoso,S.Sos,M.Si
- Natalin Siagian,SE
- Sukmawaty, S.T., M.T.
- Mardiasih, S.Sos.
- Herlinawati, A.Md.
- Fitria Ariska, A.Md.
- Ratna Juwitasari, S.Ikom
- Eka Rahma Eliyani, S.IKom.
- Septy Wulandari,S.Ikom
- Nichita Heryananda Putri,S.IKom

BAB III. MONITORING DAN EVALUASI

III.1 PRESENTASI KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi kepada Kabupaten / Kota di Kaltim, yang kini telah mengikuti jalannya proses penilaian keberhasilan dalam hal Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Adapun tahapan prosesnya saat ini ialah pemaparan kinerja teranyar dalam bentuk presentasi, yang telah digelar secara daring di ruang kerja Kadiskominfo Kaltim, Jumat 30/09/2022.

Tim Penilai nantinya akan menetapkan 3 (tiga) nominasi terbaik untuk perolehan skor keberhasilan. Ketiga daftar itu nantinya akan ditindaklanjuti kembali yakni dengan diagendakannya kunjungan secara langsung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur akan menilai secara keseluruhan, pada seksi dan bidang IKP dan Kehumasan. Selain untuk melihat pencapaian masing-masing sudah sejauh mana.

Bidang IKP dan Kehumasan Khusus Bidang IKP dilakukan penilaian untuk semua seksi yang sudah ditentukan tim penilai yakni di Seksi Pelayanan Informasi, tentang PPID, SP4N LAPOR dan Kehumasan. Selanjutnya di Seksi Monitoring Opini, yaitu terkait kerjasama hingga desiminasi informasi melalui media massa. Kemudian terkait kemitraan, terutama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

BAB III. MONITORING DAN EVALUASI

DOKUMENTASI PRESENTASI



III.2 VISITASI KE KABUPATEN/KOTA

SAMARINDA

Visitasi dilakukan di kabupaten/kota Kaltim yang masuk dalam lima besar dari hasil rekapitulasi penilaian data kuisisioner dan presentasi.

Dimulai dari Kota Samarinda Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur melakukan visitasi Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika 2022.



Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah hadir langsung menemui Tim visitasi.

BAB III. MONITORING DAN EVALUASI

VISITASI KE KABUPATEN/KOTA

BALIKPAPAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melakukan visitasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Dalam visitasi Diskominfo Kota Balikpapan menjelaskan mengenai penilaian terkait bidang IKP, APTIKA dan STATISTIK.



Kepala Diskominfo Kota Samarinda, Adamin hadir langsung menemui Tim visitasi.

PASER

Tim Penilai melihat secara langsung kondisi lapangan sesuai dengan data kuisisioner dan presentasi kabupaten/kota pada tahapan penilaian sebelumnya.



BAB III. MONITORING DAN EVALUASI

VISITASI KE KABUPATEN/KOTA

KUTAI KARTANEGARA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melakukan visitasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III. MONITORING DAN EVALUASI

III.3 HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, setelah dilakukannya pengisian SAQ, presentasi dan mengunjungi beberapa Kabupaten/Kota. didapatkan lima besar dari hasil rekapitulasi. Dan ditetapkan dalam berita acara penetapan peringkat panji keberhasilan pembangunan Kaltim Bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan tingkat pemerintahan kabupaten/kota Se-kaltim tahun 2022

PERINGKAT	KABUPATEN/KOTA	TOTAL NILAI
1	KOTA SAMARINDA	87.50
2	KABUPATEN PASER	83.24
3	KOTA BONTANG	80.00
4	KABUPTATEN KUTAI KARTANEGARA	79.63
5	KOTA BALIKPAPAN	78.00

BAB IV. PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan kepada masyarakat kedepannya.

Transformasi tata kelola pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan harusnya dilakukan melalui triple track strategies yakni deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi yang didukung sumber daya manusia serta Informasi Teknologi yang memadai sehingga kualitas dalam melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaan program kegiatan dapat terus ditingkatkan dengan mengedepankan cara-cara yang lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat,


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK --- **2022**

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT PPID KALTIM

 [ppidkaltim](#)

 ppid@kaltimprov.go.id

 ppid.kaltimprov.go.id





Daftar Isi

- 03** KATA PENGANTAR
- 04** DAFTAR ISI
- 05** GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
- 07** GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
- 08** SARAN DAN KESIMPULAN
- 09** LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

Kepala Dinas,

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19680805 199402 1 001

.....

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

I.I KEBIJAKAN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalimantan Timur menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan Publik yang secara optimal menerapkan good governance dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun selalu melaksanakan sosialisasi PPID melalui Focus Group Discussion (FGD) Uji KOnsekuensi , Rapat Kerja PPID Pelaksana, Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) Se-Kalimantan Timur, hingga roadshow ke PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

..... I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap badan publik sebagai implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, mudah, cepat dan akuntabel kepada masyarakat.

I.2 SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi Kalimantan Timur telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, yakni :

- Ruang Des/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Dimana ruangan tersebut dilengkapi dengan :
 - a. Kursi Tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas
 - c. Personal Komputer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. Printer
 - e. Scanner
 - f. Formulir permohonan informasi dan pengaduan SP4N-LAPOR!
 - g. Formulir keberatan atas informasi publik
 - h. Filling Kabinet
 - i. Lemari Arsip
- Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0541) 731963, dan email ppid@kaltimprov.go.id
- Website resmi PPID Provinsi Kalimantan Timur dapat diakses olehseluruhmasyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: PPID (kaltimprov.go.id) serta dapat mengajukan permohonan informasi melalui pion.kaltimprov.go.id. Aplikasi pelayanan informasi berbasis Mobile Apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android).

.....

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK



I.3. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Adapun sumber daya manusia yang berada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur di ada sebanyak 8 (Delapan) orang yang terdiri dari :

No	Jabatan	Gender	Jumlah Pegawai
1	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumbe Daya Komunikasi Publik	Laki - Laki	1
2	Pranata Humas Ahli Pertama	Perempuan	1
3	Pengolah Informasi dan Dokumentasi	Laki - laki	1
4	Tenaga Alih Daya (TAD)/Non PNS	Perempuan	5

.....

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

I.4. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah dialokasikan untuk kegiatan PPID, yaitu masuk dalam kegiatan pelayanan informasi publik. Akan tetapi anggaran tersebut terkena rasionalisasi karena adanya kebutuhan dana guna penanganan pandemi Covid 19. Pengelolaan PPID dilakukan sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PPID Kalimantan Timur. Kebutuhan informasi dipenuhi melalui permohonan informasi online maupun kontribusi tim.

No	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik	Rp. 342.464.500
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp.215.536.000
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp.479.000.000
TOTAL			843.018.100

II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS PUBLIK (PPID) KALIMANTAN TIMUR

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.23/2021 tentang PLID Provinsi Kalimantan Timur.



II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTAS PUBLIK (PPID) KALIMANTAN TIMUR

PPID Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan keterbukaan Informasi publik dengan menyediakan ruang pelayanan khusus permohonan informasi. Pada Sekretariat PPID ini ditempatkan seorang pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi yakni pada hari senin-kamis mulai dari pukul 09.00 - 15.00 wita dan hari Jum'at pukul 09.00 - 11.00 wita. Serta menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti;

- Tempat parkir khusus disabilitas
- Jalur Landai
- Pegangan rambat disabilitas
- Kursi roda dan tongkat
- Papan Audio Visual



- **Aspek Sarana dan Prasana Layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan Non Elektronik**

a. Website



II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID) KALIMANTAN TIMUR

Permohonan Informasi Online (PIOn)



Aplikasi PPID Berbasis Android



- **Penerapan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemprov Kaltim Tahun 2022**

Selain tersedianya sarana dan prasana pelayanan informasi publik, PPID Kalimantan Timur menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 melaksanakan Keterbukaan Informasi Pada Perangkat daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Sebanyak 37 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk PPID, dengan adanya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah sebagai Ketua PPID Pelaksana. Dan pada tahun ini, 3 dari 7 BUMD Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk PPID.

Meeting Report



NO	Perangkat Daerah	DIP	Uji Konsekuensi
1	Inspektorat Prov.Kaltim	✓	✓
2	Dinas Perindustrian, perdagangan,koperasi, dan	✓	✓
3	Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kaltim	✓	✓
4	Dinas Kelautan & perikanan Provinsi Kaltim	-	✓
5	Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim	✓	✓
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim	✓	✓
7	Badan Pendapatan daerah Provinsi Kaltim	✓	-
8	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim	✓	✓
9	DP/MPSP Provinsi Kaltim	✓	✓
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim	✓	✓
11	Dinas Pemberdayaan masyarakat & pemerintahan Desa Provinsi Kaltim	✓	✓
12	Sekretanat Korpri Kalimantan Timur	-	-
13	RSUD A.Wahid Syahrani	✓	✓
14	RSUD Dr. Kenjoso Djelimbawa	-	✓
15	RSJ Atma Husada	✓	✓
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim	-	✓
17	Satuan Polisi Pamong Praja	✓	✓
18	Badan Keseluaan Bangsa dan politik Provinsi Kaltim	✓	✓
19	BKD Prov.Kaltim	-	✓
20	Badan Penghubung Jakarta	✓	-

Meeting Report



NO	Perangkat Daerah	D/P	Uji Konsekuensi
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	√	√
22	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	√	√
23	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	-	√
24	Selbitbangda Prov. Kaltim	√	√
25	Beppeda Kaltim	√	-
26	Diskominfo Prov. Kaltim	√	√
27	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	√	√
28	Dinas Pemuda Olahraga	√	√
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim		√
30	Dinas PU dan Penataan Ruang dan Perum Rakyat	√	-
31	Dinas Perwisata	√	√
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	√
33	√	√	-
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	-
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
36	Biro Humas	-	-
37	Dinas Peternakan Prov. Kaltim	√	√

Meeting Report



d. Daftar Pemohon dan Permintaan Informasi Pelayanan Informasi Publik yang bermohon langsung di PPID Kaltim Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik
Tahun 2022

No	No	Nama	Alamat	Kategori	Jenis	Kategori	Informasi yang Diminta	Ruang Lingkup Informasi	Status Permintaan		Masa Penyelesaian		Jenis Penyelesaian		Pelayanan Informasi Publik		Tipe dan Lokasi Pemohon	
									Disetujui	Ditolak	Waktu Pemrosesan	Waktu Penyelesaian	Disetujui	Ditolak	Waktu Pemrosesan	Waktu Penyelesaian	Waktu Pemrosesan	Waktu Penyelesaian
199	0001	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
200	0002	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
201	0003	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
202	0004	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
203	0005	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
204	0006	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
205	0007	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
206	0008	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei

207	0009	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
208	0010	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
209	0011	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
210	0012	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
211	0013	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
212	0014	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
213	0015	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei
214	0016	[REDACTED]	[REDACTED]	Informasi	Survei	Survei	Survei	Survei	Ya		10 Hari	10 Hari	Survei	Survei	10 Hari	10 Hari	Survei	Survei

KEGIATAN PPID KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2022

Kegiatan yang dilaksanakan PPID Kalimantan Timur dalam menjalankan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selama tahun 2022 telah terselenggara. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PPID Kaltim yakni Roadshow ke PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Focus Group Discussion (FGD), Rakor dan Diskusi Publik dengan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya serta membuat podcast rutin dan lain sebagainya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kalimantan Timur yakni :

Menjadi Narasumber



Menjadi Narasumber di BPPSMP Pemprov Kaltim.



Menjadi Narasumber di Dinas Kelautan Pemprov Kaltim

Menerima Kunjungan Kabupaten / Kota



Kunjungan Kabupaten Kukar



unjungan Kabupaten Sangatta



Kunjungan Kabupaten Paser



Kunjungan Kabupaten Kukar

KEGIATAN PPID KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2022

Roadshow Ke PPID Pelaksana

Wujud Pembinaan, PPID Kaltim Lakukan Roadshow Keterbukaan Informasi Publik



Roadshow Satpol PP



Roadshow Dinas Kesehatan Prov. Kaltim

Kunjungan Kerja/ Studi Tiru PPID Se-Kalimantan Timur

PPID Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Daerah Provinsi Jawa Tengah. Menilik prestasi dan kemajuan yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah tentang KETERbukaan Informasi publik, menjadi daya tarik untuk berkunjung dan mengambil pelajaran ke PPID Jawa Tengah. Dilanjutkan kembali berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi D.I Yogyakarta.



Kunjungan Kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah



Kunjungan Kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang



KEGIATAN PPID KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2022



Kunjungan Kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I Yogyakarta

Podcast Streaming (NGOPI SORE)

.PODCAST STREAMING :

Program unggulan Inovasi dan PPID Kaltim ini adalah NGOPI SORE yang sudah sampai pada edisi yang ke 100 pada tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu, dengan tujuan utama penyampalan langsung informasi dari narasumber utama sebagai bentuk keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Kaltim. Dilaksanakan dengan cara-cara milenial dan kekinian dengan sasaran prioritas memang generasi muda/milenial.



Edisi Podcast Awal Tahun 2022 sampai dengan Akhir Tahun 2022

Monitoring dan Evaluasi Panji-Panji Keberhasilan Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan apresiasi kepada Kabupaten / Kota di Kaltim, yang kini telah mengikuti jalannya proses penilaian keberhasilan dalam hal Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Bidang IKP dan Kehumasan Khusus Bidang IKP dilakukan penilaian untuk semua seksi yang sudah ditentukan tim penilai yakni di Seksi Pelayanan Informasi, tentang PPID, SP4N LAPOR dan Kehumasan. Selanjutnya di Seksi Monitoring Opini, yaitu terkait kerjasama hingga desiminasi informasi melalui media massa. Kemudian terkait kemitraan, terutama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

KEGIATAN PPID KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2022



Tahap Presentasi Kabupaten/Kota sampai dengan Visitasi

Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota

Setelah terjungkal di predikat cukup informatif tahun 2018. Kaltim terus berbenah dan memperbaiki pelayanan serta melakukan beberapa inovasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat menyajikan pelayanan cepat mudah biaya terjangkau. Kalimantan Timur dapat membuktikan 2 tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang pesat. Tahun 2022 ini Pemerintah Kalimantan Timur menerima penghargaan Provinsi Informatif yang diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia dan diterima Gubernur Kaltim dan diterima secara daring. Naik tingkat dari tahun sebelumnya yang hanya menyandang predikat Informatif Peringkat. Dimana merupakan level tertinggi dari pencapaian atas pelaksanaan implemmentasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.



KEGIATAN PPID KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2022

Rapat Kerja PPID dan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pemprov Kaltim

Raker PPID Pelaksana

Rapat Koordinasi PPID yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kaltim bekerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, pada tanggal 17 Juni 2022 bertempat di hotel Jatra Balikpapan. Hadir sebagai narasumber dari PPID Provinsi adalah Kadiskominfo Muhammad Faisal.



Rapat Kerja PPID Pelaksana Kaltim

Raker PPID Pelaksana dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim



Rapat Kerja PPID Pelaksana Kaltim dengan Biro Kesra

FKPPID



FKPPID Se-Kalimantan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah

KEGIATAN PPID KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2022

B. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT

Setelah terjungkal di predikat cukup informatif tahun 2018. Kaltim terus berbenah dan memperbaiki pelayanan serta melakukan beberapa inovasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat menyajikan pelayanan cepat mudah biaya terjangkau. Kalimantan Timur dapat membuktikan 2 tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang pesat. Tahun 2022 ini Pemerintah Kalimantan Timur menerima penghargaan Provinsi Informatif yang diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia dan diterima Gubernur Kaltim dan diterima secara daring. Naik tingkat dari tahun sebelumnya yang hanya menyandang predikat Informatif Peringkat. Dimana merupakan level tertinggi dari pencapaian atas pelaksanaan implemementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan informasi publik.



Gubernur Kalimantan Timur menerima Penghargaan dengan nilai 95,93 meraih predikat Informatif

SARAN DAN KESIMPULAN

RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kaltim pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

- Menumbuhkan komitmen pelaksana pelayanan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oleh sebab itu komitmen pelaksana layanan harus didukung. Faktor pertama yang mempengaruhi komitmen pelaksana pelayanan publik adalah komitmen organisasi, karena performa pelaksana pelayanan publik sendiri, tidak lepas dari manajerial yang dilaksanakan oleh Pimpinan Organisasi.
- Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis atau Forum Komunikasi untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Pelaksana Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
- Pemutakhiran Sistem Informasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK), kurang maksimal karena masih rendahnya partisipasi dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyediakan informasi.
- Pengumpulan Surat Tugas oleh Kepala OPD tentang Penunjukan Petugas/Admin SIDIK.
- Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah dan BUMD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diperbaharui dan direvisi pada setiap Perangkat Daerah dan pengumpulan laporan tahunan.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

A. SARAN

Laporan ini sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini untuk mengetahui dan mengukur realisasi fisik maupun keuangan dalam melaksanakan program/kegiatan keterbukaan informasi Tahun Anggaran 2022 yang telah dilaksanakan.

Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur ataupun menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Laporan ini bersifat terbuka, dan bilamana ada pihak-pihak yang bermaksud mempublikasikannya agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan akurasi data ataupun informasi yang ada dalam buku ini.

Oleh karena kami sangat menyadari sepenuhnya laporan ini masih banyak kekurangannya dan bisa terjadi terdapat kekeliruan didalamnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dan kami mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

B. KESIMPULAN

Secara yuridis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID Provinsi Kalimantan Timur diuntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Provinsi Kalimantan Timur memiliki kendala dalam memberikan layanan informasi baik dari sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak berpuas diri dalam capaian

sekarang dengan fokus pada target meningkatkan nilai dan point sehingga mencapai pelayanan terbaik.

LAPORAN KEGIATAN

MONITORING KETERHUBUNGAN PELAYANAN PENGADUAN MELALUI SP4N-LAPOR!

15 SEPTEMBER 2022



HOTEL GRAND JATRA
JL.JEND.SUDIRMAN NO.47
BALIKPAPAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL.BASUKI RAHMAT NO.41 SAMARINDA

15 SEPTEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map SP4N Tahun 2020-2024.

Monitoring keterhubungan pelayanan pengaduan Tahun 2022 selain bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta BUMD yang ada, juga bertujuan untuk memastikan pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! di Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan lancar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selaku penyelenggara kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar.

Demikian disampaikan, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kepada kita semua tentang pelaksanaan kegiatan Monitoring Keterhubungan pelayanan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Samarinda, 19 September 2022

**Kepala Dinas Komunikasi &
Informatika Prov.Kaltim,**

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
NIP.19680805 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. LANDASAN HUKUM	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	6
D. SASARAN	6
E. HASIL YANG DIPEROLEH	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN	8
B. TIM MONITORING KETERHUBUNGAN PENGADUAN	8
C. METODE PEMAPARAN	8
D. PEMBIAYAAN	8
BAB III PENUTUP	9
KESIMPULAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tim Monitoring Keterhubungan Pelayanan Pengaduan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
2. Surat Tugas Narasumber
3. Permohonan Narasumber
4. Materi Narasumber
5. Permohonan Membuka Acara
6. Undangan Peserta
7. Daftar Hadir
8. Dokumentasi Foto

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tahapan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 adalah kegiatan monitoring keterhubungan pelayanan pengaduan bagi seluruh Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari monitoring pengelolaan pengaduan ini ke depannya dapat mencapai Sasaran Strategis Nasional yaitu “mewujudkan Sistem Pengelolaan Pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya” atau *“fast response, fast solution, and trusted complaint handling system”*.

Melalui kegiatan Monitoring Keterhubungan Pelayanan Pengaduan ini maka seluruh peserta yang terdiri dari Perangkat Daerah beserta BUMD diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat melalui pengelolaan pengaduan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE mengamanatkan untuk menggunakan aplikasi umum. Di bidang pengaduan aplikasi umum yang telah ditetapkan adalah Aplikasi SP4N-LAPOR!, namun kondisi di lapangan hasil monitoring keterhubungan ini menyebutkan bahwa pelayanan pengaduan telah dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah ada yang tidak menggunakan SP4N-LAPOR!. Hal ini salah satunya disebabkan karena ketidaktahuan oleh Perangkat Daerah dimana terjadi pergantian Sumber Daya Manusia dalam mengelola pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.

Melihat situasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kepentingan melalui tugas fungsinya menyampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD untuk menggunakan SP4N-LAPOR! dan sementara dapat berdampingan dengan format pengaduan yang ada kemudian menginput manual laporan aduan tersebut.

Apabila sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan jumlah aduan dengan kuantitas yang besar maka diharapkan aspirasi dan aduan publik yang didengar, ditampung, diselesaikan tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Keterhubungan Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Monitoring Keterhubungan Pelayanan Pengaduan adalah untuk mencapai Sasaran Strategis Nasional yaitu mewujudkan Sistem Pengelolaan Pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyamakan persepsi terkait kebijakan-kebijakan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Meningkatkan koordinasi antar Pejabat Penghubung di seluruh Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD terkait fungsi pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
4. Meningkatkan pelayanan pengaduan oleh seluruh Perangkat Daerah dan BUMD kepada masyarakat;
5. Menyatukan langkah dan meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah dan BUMD sehingga mencapai tujuan yaitu terselenggaranya pelayanan pengaduan di Kalimantan Timur yang cepat, terpercaya berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

D. Sasaran

Sasaran Kegiatan adalah Sekretaris beserta Kasubbag. TU selaku Pejabat Penghubung Perangkat Daerah serta Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

E. Hasil yang diperoleh

Dalam monitoring keterhubungan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! telah mencapai hasil-hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diantaranya:

1. Adanya kesamaan persepsi terkait kebijakan-kebijakan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Meningkatnya koordinasi antar Pejabat Penghubung di seluruh Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Adanya pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD terkait fungsi pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
4. Meningkatnya pelayanan pengaduan oleh seluruh Perangkat Daerah dan BUMD kepada masyarakat;
5. Menyatunya langkah dan meningkatnya kerjasama antar Perangkat Daerah dan BUMD sehingga mencapai tujuan yaitu terselenggaranya pelayanan pengaduan di Kalimantan Timur yang cepat, terpercaya berasaskan transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan monitoring keterhubungan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 mulai pukul 08.00 s/d 13.00 WITA dengan dihadiri seluruh Sekretaris beserta Pejabat Penghubung dan Admin Perangkat Daerah dan Direktur BUMD atau yang mewakili dengan total 100 peserta.

B. Tim Monitoring Keterhubungan Pengaduan

Tim Monitoring Keterhubungan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

a) Tim Monitoring

1. Pengarah : Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
2. Penanggung jawab : Pj.Sekretaris Daerah Kalimantan Timur;
3. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
4. Wakil Ketua : Kabid.IKP;
5. Sekretaris : Sub Koordinator Seksi Pelayanan Publik;
6. Anggota:
 - 1) Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2) Biro Hukum Setda.Provinsi Kalimantan Timur;
 - 3) Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim;
 - 4) Staf PNS sebanyak 2 (dua) orang;
 - 5) Staf Non PNS sebanyak 3 (tiga) orang.

b) Narasumber dan Moderator

Narasumber: Analis Pengelolaan Pengaduan Kementerian PAN-RB, Bapak Alfian Afan
Moderator sekaligus Pembawa Acara: Nichita Heryananda Putri, S.IKom

c) Undangan yang turut hadir

Undangan yang turut hadir diantaranya:

- 1) Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur
- 2) Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Direktur/Wakil Direktur RSUD Provinsi Kalimantan Timur
- 4) Sekretaris Badan/Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 5) Kepala Biro Umum, Biro Adpim dan Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim
- 6) Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Balikpapan yang diwakili oleh Sekretaris.

C. Metode Pemaparan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode diskusi panel oleh Narasumber dari Kementerian PAN-RB yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta dipandu oleh MC sekaligus Moderator.

D. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh DPA Perangkat Daerah Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang relevan.

BAB III P E N U T U P

Kesimpulan

Kegiatan Monitoring Keterhubungan Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! telah dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 serta berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.

Terdapat beberapa hal yang telah dikoordinasikan dalam kegiatan ini diantaranya adanya konektivitas dalam pengelolaan pengaduan, diantaranya pada website lapor.go.id untuk dikoneksikan dengan website masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD. Di samping Perangkat Daerah, UPTD serta Cabang Dinas di bawahnya juga diharapkan terhubung dengan SP4N-LAPOR!.

Kemudian diperlukan pula adanya pengaduan yang diinput manual apabila terdapat pengaduan yang masuk melalui kanal lain walaupun nantinya secara pelan-pelan dapat dihentikan apabila tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tentang SPBE.

Dan selain Perangkat Daerah, dalam pengelolaan pengaduan ini bagi BUMD dimana tergolong baru maka dapat segera mengajukan nama Admin atau Pejabat Penghubung ke Dinas Kominfo Kaltim.

Samarinda, 19 September 2022

**Kepala Dinas Komunikasi &
Informatika Prov.Kaltim,**

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
NIP.19680805 199402 1 001

LAMPIRAN 5
Rekapitulasi Media Online TA. 2022

REKAPITULASI MEDIA ONLINE TA. 2022

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN
1	LKBN	LKBN Antara
2	Daulat News	PT. Express Inovasi Media
3	Okeborneo.com	PT. Kutai Digital Cakrawala
4	Berita Kaltim	PT. Charle Media Grup
5	Detak Kaltim	PT. Detalk Kaltim Multimedia
6	Prokal.co	PT. Duta Prokal Multimedia
7	Koran Kaltim	PT. Media Bangun Bersama
8	Klik samarinda	PT. Klik Media Barokah Utama
9	Nomorsatu Kaltim.com	PT. Kalimantan Media Nusantara
10	Katuju.com	PT. Hariansyah Karya Media
11	Kaltimkece	PT. Kaltim Keren Cerdas
12	KaltimNews	PT. Digital Studio Production
13	Pusaran	PT. Lintas Bangun Media
14	Harian Jurnal	PT. Jurnal Media Nasional
15	Penasatu.com	PT. Pena Sarana Media Kaltim
16	Kabar IKN	PT. Media Kabar Balikpapan Mandiri
17	Kate.id	PT. Media Kate Indonesia
18	Titikwarta.co	PT. Adua Putrajaya Sukses
19	Pojokaltim.co	PT. Lintas Jaya Kaltim
20	Perempuan.co	PT. Lokal Transmedia
21	Fokusaltim.co	PT. Pelangi Multimedia Grafika
22	Garispena.co	PT. Samudra Garis Pena
23	Kronikkaltim.com	PT. Intens Wija Kreasi
24	Halokaltim.com	PT. Warwas Grafika Nusantara
25	Anews.id	PT. Abdi Ruang Bakti
26	Nukaltim.id	PT. Borneo Media Bangsa
27	Bujurnews.com	PT. Berdikari Lancar Barokah
28	Akurasi.id	PT. Karya Grafika Kaltim
29	Adakata.id	PT. Kata Media Sejahtera
30	Nalarnews.id	PT. Samudra Kencana Media
31	Upnews.id	PT. Dirgantara Media Jaya
32	Integritaskaltim.com	PT. Artara Bintang Media Perkasa
33	Saskindomedia	PT. Saskindo Media Grup
34	Infobenua.id	PT. Eka Mandiri Grup Sejahtera
35	Newsbontang.com	PT. Karya Media Mandiri
36	Timeskaltim.com	PT. Media Pergerakan Bersama

37	Borneoupdate	PT. Digital Nusantara Satu
38	Niaga.asia	PT. Kaltim Prima Multi Media
39	Kalpostonline.com	PT. Box Media Online
40	Lensa Borneo	PT. Media Rezky Utama
41	VIVA borneo.com	PT. Viva Borneo Mediatama
42	Politikal.id	PT. Digital Media Mahakarya
43	Balikpapanupdate.com	PT. Nusacipta Media Indonesia
44	Kaltimutama.com	PT. Borneo Indonesia Mediatama
45	Kaltimkita.com	PT. Kaltim Etam Mandiri
46	Busam.id	PT. Busam Media Digital
47	Infokaltim	PT. Media Info Kaltim
48	Kaltim Today	PT. Media Mandiri Perkasa
49	Updatekaltim	PT. Warta Jaya Borneo
50	Mediakaltim	PT. Media Kaltim Promosindo
51	Diksi	PT. Diksi Media Indonesia
52	Pojoknegeri	PT. Tistar Digital Indonesia
53	Presisi	PT. Nur Citra Mulia
54	Afiliasi	PT. Afiliasi Anak Bangsa
55	Vonis.id	PT. Bintang Mahakarya Digital
56	Tribun Kaltim	PT. Mahakam Media Grafika
57	Publikkaltim.com	PT. Dwi Tunggal Media
58	Klausa.co	PT. Klausa Media Indonesia
59	Kaltimnow.ID	PT. Mednow Digital Bersama
60	Mediaetam.com	PT. Tren Multimedia Etam
61	InfoIndonesia	PT. Wahana Multimedia
62	Kaltimpedia	PT. Karya Digital Prima Media
63	Garda.co.id	PT. Garda Multimedia Indonesia
64	Purantara.id	PT. Mahakam Aktual Dimensi
65	Agresifnews	PT. Media Nusantara Kutim
66	Headlinekaltim	PT. Kaltim Tama Cakrawala
67	Deadline.co.id	PT. Karunia Berliana Media
68	GATV	PT. Wijalawo Mandiri Sejahtera
69	Hariankaltim	PT. Energi Multimedia Indonesia
70	Pranala.co	PT Winara Etam Media
71	Adakah.id	PT Aksara Bumi Media
72	Persepsinews.com	PT. Persepsi Media Kreatif
73	Lingkaran Berita.com	PT. Lingkaran Media Nusantara
74	Kembaratimur.com	PT. Kudungga Grafika Nusantara
75	Swara Kaltim.com	PT. Media Swara Kaltim

76	Eventnusantara.com	PT. Mitra Event Nusantara
77	Radarbontang.com	PT. Radar Media Megatama
78	Selasar	PT. Selasar Lingkar Media
79	Kaltim Faktual	PT. Media Kaltim Faktual
80	Nusantara+	PT. Mila Multimedia Nusantara
81	Narasi	PT. Media Narasi Indonesia
82	Infosatu	PT. Media Rizqi Pratama
83	Seruya	PT. Wisnu Aditya Intermedia Palopo
84	Expresi.co	PT. Elang Aksamala Arka

REKAPITULASI VIDEOTRON TA. 2022

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN
1	Rexindo Advertising	CV. Rexindo Advertising
2	Berkat Bersama	CV. Berkat Bersama
3	Assyifa Advertising	CV. Assyifa Pratama Advertising
4	Magnum Opus	CV. Magnum Opus

REKAPITULASI MEDIA CETAK TA. 2022

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN
1	Balikpapan Pos	PT. Duta Margajaya Perkasa
2	Kaltim Post	PT. Duta Manuntung
3	Berau Post	PT. Berau Duta Lintasmedia
4	Swara Kaltim	PT. Duta Media Kaltim Press
5	Samarinda Pos	Pt. Kalimantan Karya Nusantara
6	Disway	PT. Kalimantan Karya Nusantara
7	Koran Kaltim	PT. Media Bangun Bersama
8	TribunKaltim	PT. Mahakam Media Grafika

REKAPITULASI TELEVISI 2022

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN
1	TVRI	Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
2	Balikpapan TV (btv)	PT. Balikpapan Televisi
3	STV	PT. Samarinda TV

REKAPITULASI RADIO 2022

NO	URAIAN	NAMA PERUSAHAAN
1	RRI	Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
2	Suara Samarinda	PT. Radio Berita Kaltim
3	Heartline	PT. Radio Suara Sejahtera
4	Smart FM Bpp	PT. Radio Swara Mandiri Artisenindo
5	KPFM Samarinda	PT. Radio Swara Kreasi Samarinda
6	KPFM Balikpapan	PT. Radio Swara Kreasi Balikpapan

LAMPIRAN 6
Laporan indeks kami Prov Kaltim

A. Ruang Lingkup:

1. Instansi / Unit Kerja:
Layanan Data Center/ Ruang Server dan Sistem Informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Fungsi Kerja:
Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Diskominfo memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Lokasi:

No	Nama Lokasi	Alamat
1	Kantor dan Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kalimantan Timur	Jl. Basuki Rahmat No.41, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121

B. Nama /Jenis Layanan Publik:

Layanan Infrastruktur Data Center/ Ruang Server dan aplikasi sistem informasi (<https://webmail.kaltimprov.go.id/>) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Timur.

C. Aset TI yang kritikal:

1. Aplikasi:
Memiliki 131 aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Pemprov Kalimantan Timur baik yang hosting di dalam maupun di luar Diskominfo.
2. Server :
 - Server kaltimprov.go.id
3. Infrastruktur Jaringan/Network:
 - ISP PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)

D. DISASTER RECOVERY CENTER (DRC):

- ADA Dikelola Internal Dikelola Vendor :
 TIDAK ADA

Dokumen yang diperiksa:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2023
2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Rancangan Perubahan Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
4. Surat Keputusan Tim CSIRT Kalimantan Timur;
5. Rancangan Pergub Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Daerah;
6. Draft Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Draft penyelenggaraan dan pemanfaatan sistem elektronik di pemerintah provinsi Kalimantan Timur;
8. Laporan Pendahuluan dan Akhir hasil Asesmen Keamanan Informasi dalam rangka Penyusunan Dokumen dan kelengkapan SMKI;
9. Kumpulan Daftar SOP SMKI dan Operasional Diskominfo;
10. Indikator Kinerja Individu Kepala Diskominfo tahun 2021 dan 2022;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, 2019 dan 2020;
12. Dokumen Inventaris Barang dari SIMDA tahun 2018 sd. 2019;
13. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020;
14. Bahan Literasi Keamanan Informasi "Pengenalan Internet Sehat".
15. Laporan Interoperabilitas Sistem Informasi No 10 Tahun 2014;
16. Keputusan Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur No. 489/064/Diskominfo/2019 tentang Pembentukan Tim untuk Perancangan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

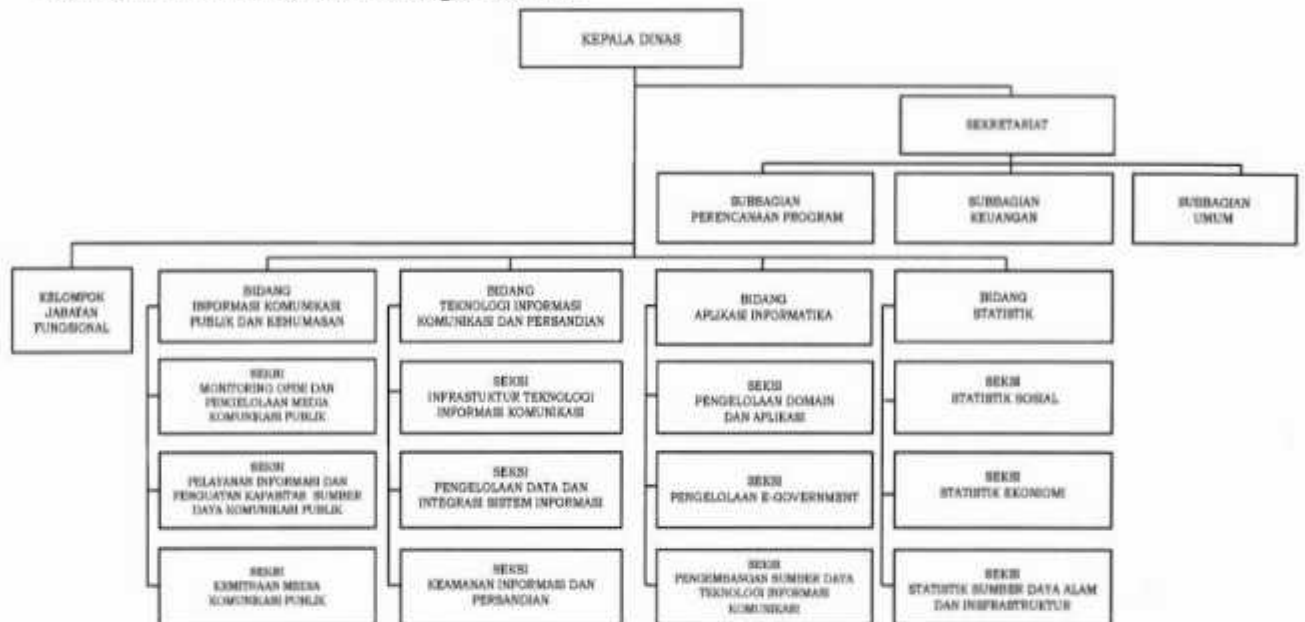
Bukti-bukti (rekaman/arsip) penerapan SMKI:

1. Tangkapan layer hasil filtering email dengan mikrotik;
2. Topologi interkoneksi jaringan dan integrasi Server Diskominfo;
3. Hasil tangkapan Web Application Firewall;
4. Sistem monitoring dengan open source Wazuh;
5. Hasil tangkapan scanning dengan BitNinja console.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dan wawancara terhadap narasumber instansi/lembaga disimpulkan sebagai berikut :

KONDISI UMUM:

1. Diskominfo Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Kalimantan Timur, berikut struktur Diskominfo Pemprov Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Diskominfo Pemprov Kalimantan Timur

2. SDM pengelola terdiri dari: (berdasarkan dokumen Renstra)

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	51	49%
2	CPNS	0	0%
3	Tenaga Ahli Daya	62	51%
Jumlah		113	100%

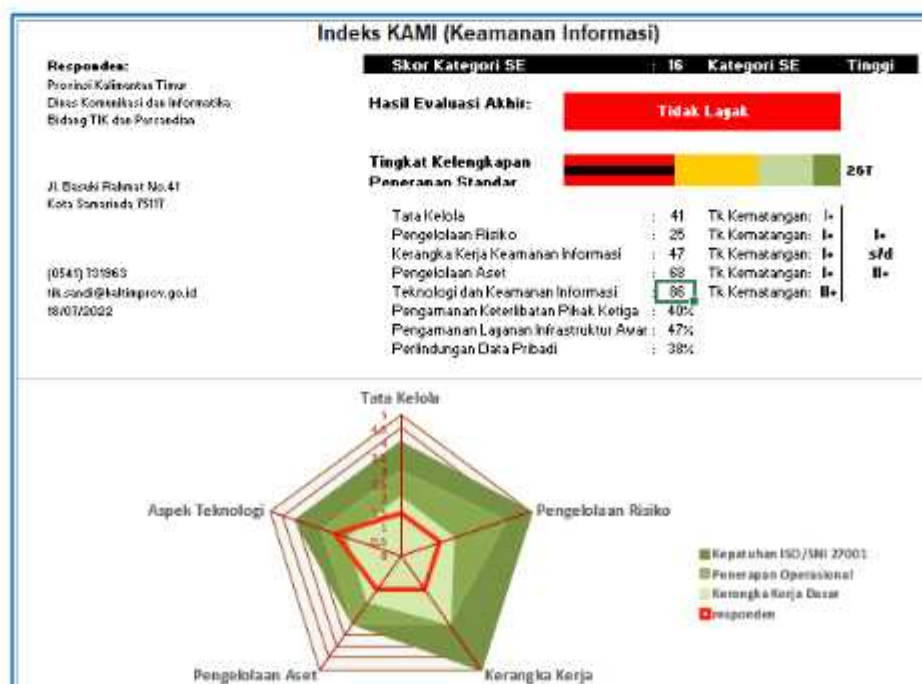
3. Berdasarkan verifikasi terhadap hasil *Self Assessment* isian *file* Indeks KAMI diperoleh hasil sebagai berikut:

Penilaian Mandiri Indeks KAMI dilakukan di tahun 2022 ini dengan ruang lingkup Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ruang Server dan Sistem Informasi yang dikelola dan dilakukan verifikasi oleh Tim BSSN dengan kategori **Tinggi** dan hasil evaluasi akhir **Tidak Layak** dengan total nilai **250** dari seluruh nilai yang berjumlah **645**.

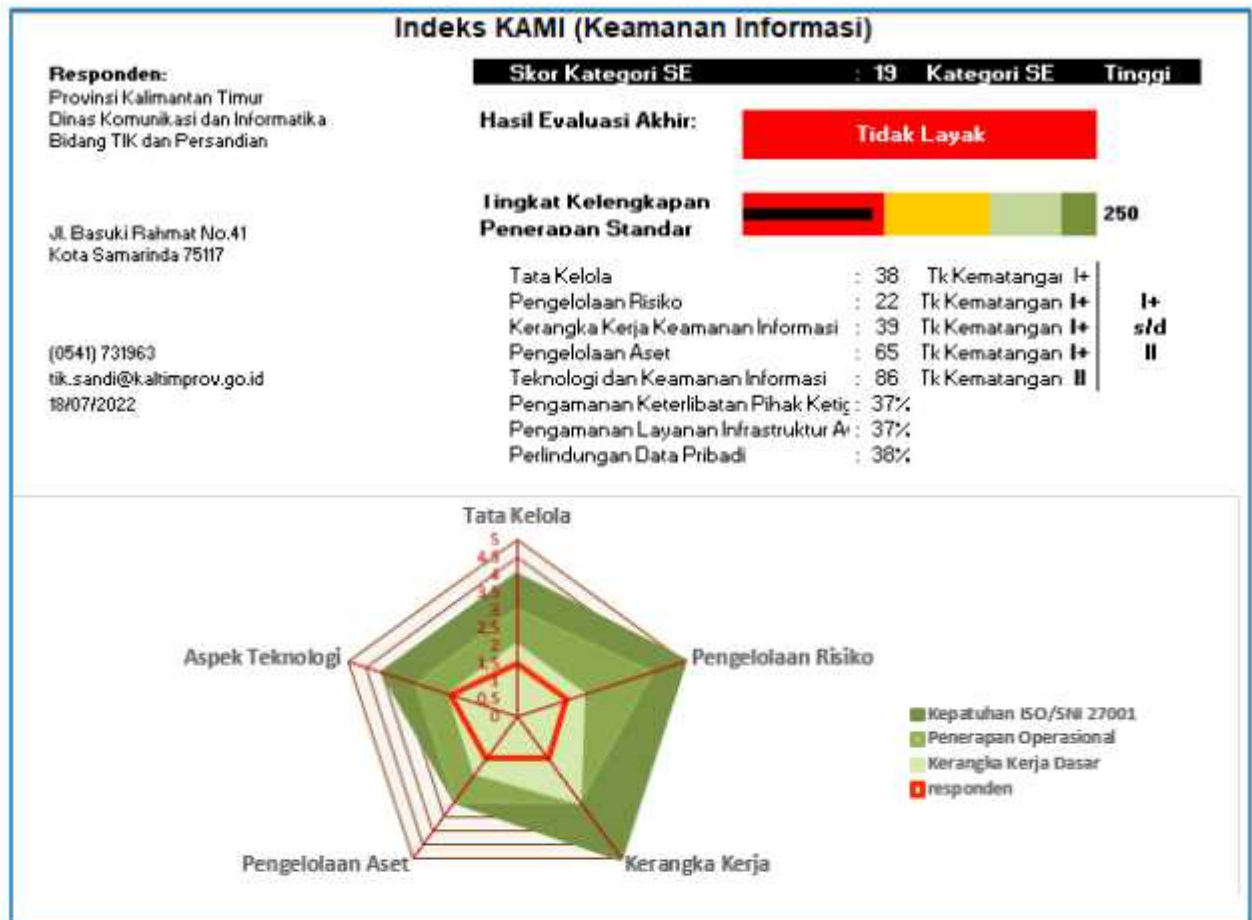


Pada tahun 2022 ini merupakan periode kali pertama bagi lingkup Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan verifikasi oleh Tim BSSN dalam penilaian mandiri Indeks KAMI, sehingga sesuai mekanisme kebijakan yang ada untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi adalah dengan melakukan pengecekan keseluruhan kelengkapan kebijakan dan/atau prosedur dan penerapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur pada area Kategori, Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi serta Suplemen. Pada pelaksanaan verifikasi, Tim Asesor berupaya untuk membantu dan mengarahkan lingkup Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan implementasi Keamanan Informasi sesuai ruang lingkup Diskominfo melalui menyiapkan data dukung/ *evidence* berikut penerapan dan perbaikannya secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan proses penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang secara langsung berdampak pada meningkatnya fungsi Persandian dan Pengamanan Informasi di Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur secara lebih optimal.

Total Score Sebelum Verifikasi: 267 (ref. file Indeks KAMI v4.2 pra Verifikasi)



Total Score Setelah Verifikasi: 250 (ref. file Indeks KAMI v4.2 pasca Verifikasi)



REKOMENDASI

1. Merujuk pada Pergub tentang SOTK maka perlu ditetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi yang terintegrasi dengan konsep keamanan lainnya baik penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi maupun SPBE dimana berdasarkan dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar penetapan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan SMKI pada lingkup Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi serta pengujian kepatuhannya secara berkelanjutan (audit internal).
2. Perlu mengevaluasi hasil gap analisis kondisi keamanan informasi yang telah disusun untuk dilakukan tinjauan manajemen terhadap regulasi dan kebijakan yang telah dimiliki dan membuat pemetaan terhadap turunan kebijakan prioritas keamanan informasi yang digunakan sebagai prosedur operasional dan dasar melakukan pemantauan dan perbaikan secara berkelanjutan dalam penerapan SMKI di Pemprov Kalimantan Timur.
3. Perlu menyusun kebijakan pemetaan kebutuhan SDM yang akan mengawaki SMKI dan dengan memperhatikan kualifikasi kompetensi serta pemenuhan kebutuhannya secara periodik dalam rangka menjaga pengelolaan SMKI berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek dalam implementasi SPBE.
4. Agar pelaksanaan SMKI berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar serta keamanan informasi yang telah ditetapkan, Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun dan mengevaluasi kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penetapan identifikasi Data Pribadi berikut klasifikasi dan metode pengamanan yang diterapkan dengan merujuk pada Perkominfo 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.

- b. Pola koordinasi secara efektif baik internal maupun eksternal Diskominfo.
 - c. Kebijakan BCP dan DRP dalam menjaga keberlangsungan bisnis proses dan keamanan serta perlindungan aset organisasi secara terencana dan dilakukan monitoringnya secara rutin.
5. Agar menyusun kebijakan/panduan pengelolaan risiko yang merujuk pada Permenpan nomor 5 tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE atau ISO 27005, NIST SP 800-30 di mana di dalamnya terdapat kerangka kerja yang dapat digunakan dalam manajemen risiko sistem informasi, di mana ada 3 (tiga) tahapan dalam proses manajemen risiko, yaitu *risk assessment*, *risk mitigation*, dan *risk evaluation*. dan selanjutnya digunakan sebagai bagian dari proses penerapan manajemen risiko di Pemprov Kalimantan Timur khususnya pada lingkup Diskominfo secara sistematis dan terstruktur.

PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam pelaksanaan pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

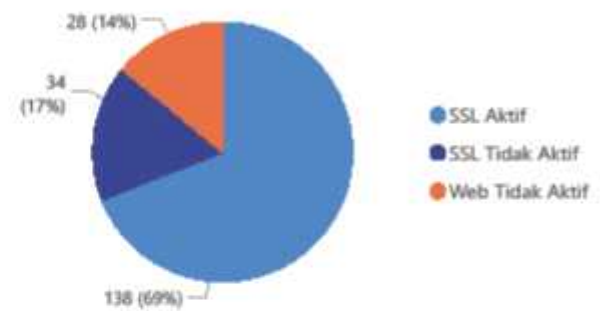
LAMPIRAN 7
Laporan Monitoring SSL Tahun 2022



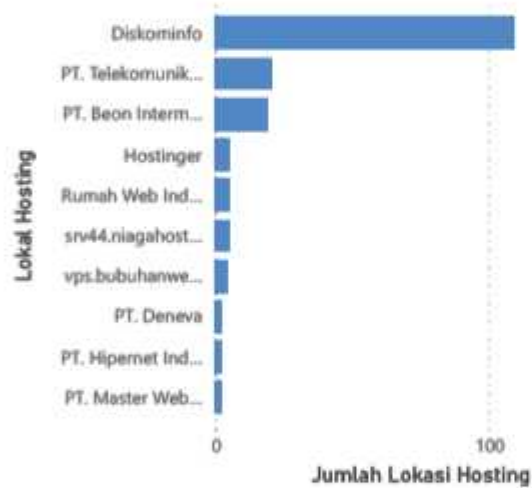
LAPORAN MONITORING SSL TAHUN 2022

Jumlah SSL Aktif, Tidak Aktif dan Web Tidak Aktif

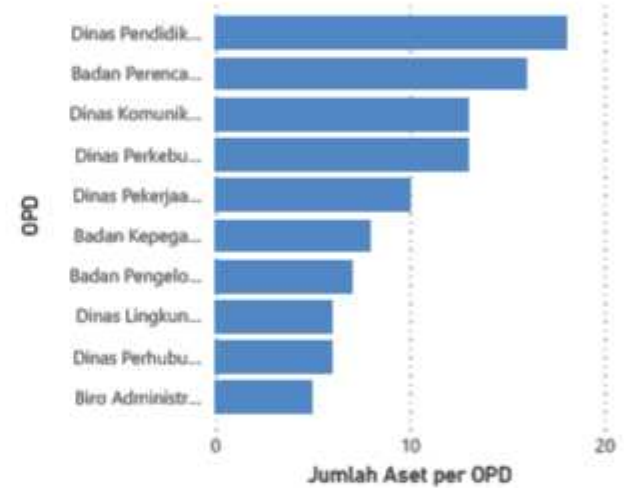
193
Jumlah Aset



Top 10 Lokasi Hosting



Top 10 Jumlah Aset OPD



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secure Sockets Layer, atau disingkat SSL, merupakan protokol keamanan yang menggunakan enkripsi modern untuk mengirimkan dan menerima informasi bersifat sensitif yang ada dan tersebar di seluruh internet. Cara kerja SSL adalah membuat channel yang aman di antara pengguna browser dan server website yang hendak dituju user. Informasi apa pun yang melewati channel ini akan dienkripsi di satu end dan didekripsi setelah diterima di end lain.

Dalam sistem informasi, data yang saling berhubungan dan digunakan oleh beberapa bagian seharusnya tersimpan dalam suatu server database, sedangkan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola datanya tersimpan dalam server aplikasi. Agar para pengguna bisa menggunakan sistem informasi tersebut dengan baik, maka jaringan komputer eksisting harus didukung oleh sistem manajemen jaringan. Manajemen jaringan, database, dan aplikasi tersebut dikelola dalam sebuah tempat atau fasilitas yang disebut data center. Disini berbagai perangkat jaringan dan server beserta tim pengelolanya melakukan berbagai aktivitas agar jaringan komputer dan semua sistem informasi berjalan dengan baik. Pembangunan data center haruslah memenuhi standar untuk menjamin eksistensi data yang tersimpan di dalamnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar yang melandasi pelaksanaan Sewa Secure Socket Layer (SSL) Diskominfo adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperbaharui menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
3. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
4. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Sewa Secure Socket Layer (SSL) Diskominfo up adalah:

1. Tersedianya Sistem Keamanan Jaringan dan keamanan aplikasi web dalam data center.
2. Tersedianya perangkat Teknologi Keamanan Informasi yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Terwujudnya standar layanan keamanan informasi pada aset-aset elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penangan Insiden Keamanan Informasi berasal dari APBD Tahun 2022 Diskominfo Prov.Kaltim DPA No. 2.21.02.1.01.04 pada sub kegiatan Penyediaan layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

B. HASIL KEGIATAN

Lisensi SSL diadakan untuk periode 18 april 2022 s.d 19 Mei 2023 dan telah di install di beberapa website dan aplikasi.

BAB III KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

SSL merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer yang fungsinya menjamin para visitor ketika hendak mengirimkan informasi sensitif dari dan ke server. SSL mengenkripsi semua data yang ditransfer sehingga tidak bisa dicuri atau disadap oleh pihak ketiga, misalnya hacker dan scammer. Dari hasil monitoring dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Diketahui aset keseluruhan aplikasi dan web milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 193 aset
2. Terdapat 138 aset yang sudah diamankan melalui SSL dan 34 aset yang SSL tidak aktif dimana 28 diantaranya web/aplikasi tersebut tidak aktif atau tidak dapat diakses.
3. Sebanyak 109 aset yang lokasi hosting dan penempatannya pada server milik Diskominfo Kaltim sedangkan 84 aplikasi/web lainnya ditempatkan diluar server milik Diskominfo Kaltim
4. SSL yang tidak aktif diantaranya, yaitu :

No	OPD	Alamat Link
1	UPTD PKB	uptdpkb.kaltimprov.go.id
2	Dewan Daerah Perubahan Iklim	ggc.ddpi.kaltimprov.go.id
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	www.disporakaltim.info
4	Dinas Perkebunan	siapbun.kaltimprov.go.id
5	Dinas Perkebunan	sipkebun.kaltimprov.go.id
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	opac.kaltimprov.go.id
7	Dinas Perhubungan	sikape.kaltimprov.go.id
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	siperkim.kaltimprov.go.id
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	perkim-dpupr.kaltimprov.go.id

No	OPD	Alamat Link
	dan Perum Rakyat	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	e-office.disdik.kaltimprov.go.id
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	e-gtk.disdik.kaltimprov.go.id
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dupak.disdik.kaltimprov.go.id
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	perpus.disdik.kaltimprov.go.id
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ppdb.disdik.kaltimprov.go.id
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	sync.disdik.kaltimprov.go.id
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dapodik.disdik.kaltimprov.go.id
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	sidirga.kaltimprov.go.id
18	Badan Kepegawaian Daerah	anjab.kaltimprov.go.id
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	giokmas.kaltimprov.go.id
20	Inspektorat	silapor.kaltimprov.go.id
21	Badan Pendapatan Daerah	simpator.kaltimprov.go.id
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	sigelatik.kaltimprov.go.id
23	Dinas Perhubungan	datadishub.kaltimprov.go.id
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	tarudpupr.kaltimprov.go.id
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	geoserver-tarudpupr.kaltimprov.go.id
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	berkas-beasiswa.kaltimprov.go.id
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	cabdin-beasiswa.kaltimprov.go.id
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	akpk.kaltimprov.go.id
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	simda.kaltimprov.go.id
30	Badan Kepegawaian Daerah	enonpns.kaltimprov.go.id
31	Badan Kepegawaian Daerah	eskp.kaltimprov.go.id
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	simdaren.kaltimprov.go.id
33	Biro Administrasi Pembangunan	mpu.kaltimprov.go.id
34	Biro Umum	sijamu.kaltimprov.go.id

5. Aset yang tidak aktif diantaranya, yaitu :

No	OPD	Alamat Link
1	SKOI	skoi.kaltimprov.go.id
2	UPTD PKB	uptdpkb.kaltimprov.go.id
3	Dewan Daerah Perubahan Iklim	ggc.ddpi.kaltimprov.go.id
4	Dinas Perkebunan	pptp.disbun.kaltimprov.go.id
5	Dinas Perkebunan	tpp.disbun.kaltimprov.go.id
6	Dinas Perkebunan	pbb.disbun.kaltimprov.go.id
7	Dinas Perkebunan	geospasial-perkebunan.kaltimprov.go.id
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	arsip.kaltimprov.go.id
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	sijambang.kaltimprov.go.id
10	Dinas Perhubungan	bung.kaltimprov.go.id
11	Dinas Perhubungan	sidishub.kaltimprov.go.id
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	siperkim.kaltimprov.go.id
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	perkim-dpupr.kaltimprov.go.id
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	wastek.kaltimprov.go.id
15	Dinas Kesehatan	sipmars.kaltimprov.go.id

No	OPD	Alamat Link
16	Badan Kepegawaian Daerah	sao-bkd.kaltimprov.go.id
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	cloudgeospasial.kaltimprov.go.id
18	Inspektorat	silapor.kaltimprov.go.id
19	Biro Hubungan Masyarakat	sikaltimpedia.kaltimprov.go.id
20	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	kerjasama.kaltimprov.go.id
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ldap.kaltimprov.go.id
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	sidik.kaltimprov.go.id
23	Dinas Lingkungan Hidup	casked-mahakam.kaltimprov.go.id
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perum Rakyat	geoserver-tarudpupr.kaltimprov.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	simdakeu2.kaltimprov.go.id
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	simdakeu1.kaltimprov.go.id
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	elibbappeda.kaltimprov.go.id
28	Biro Administrasi Pembangunan	taggingmonev.kaltimprov.go.id

6. Terdapat 3 aset yang masih belum menggunakan sub-domain kaltimprov.go.id, yaitu :

No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	www.disporakaltim.info
2	RSUD Abdul Wahab Syahrani	rsudaws.co.id
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpolprovkaltim.info

B. SARAN/TINDAK LANJUT

1. Penggunaan SSL KaltimProv hanya dapat dilakukan pada sub-domain kaltimprov.go.id, oleh karena itu penggunaan sub-domain diluar dari kaltimprov.go.id tidak dapat dilakukan, disarankan bagi pemilik aset agar dapat menggunakan sub-domain milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi kembali terhadap aset-aset yang sudah tidak aktif lagi, agar dapat dilakukan penghapusan aset dan sub-domain yang ada.

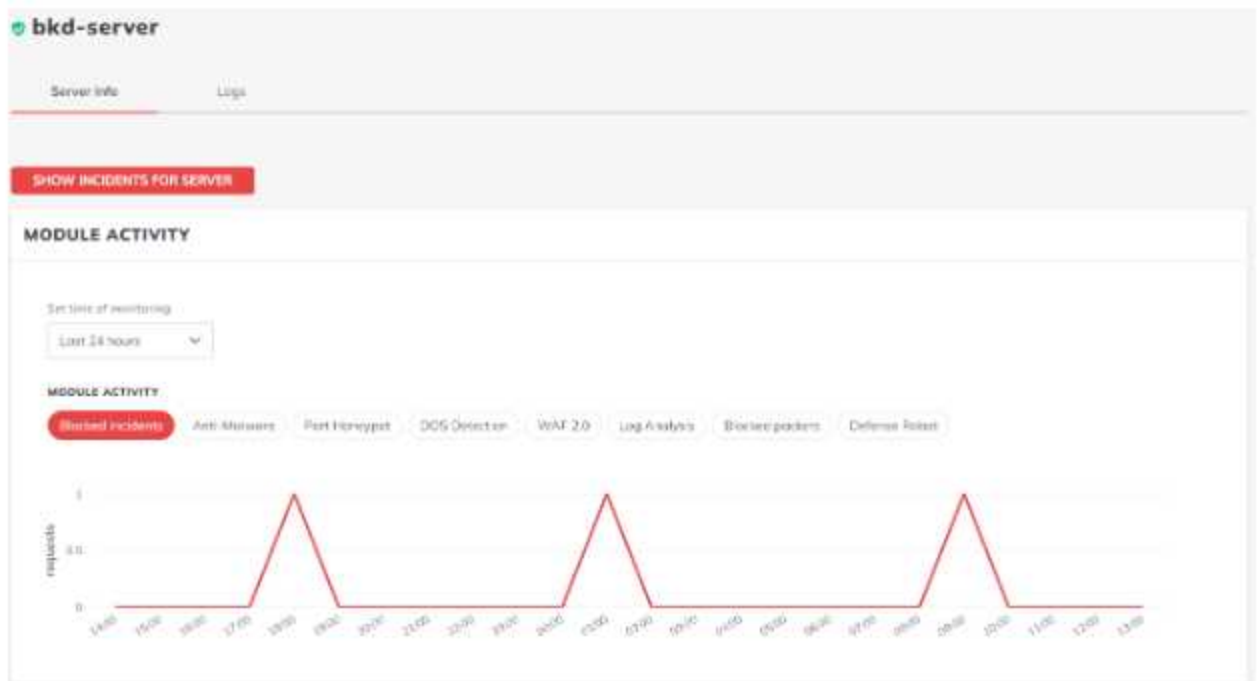
LAMPIRAN 8

Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

1. BKD – Server (5 SE)

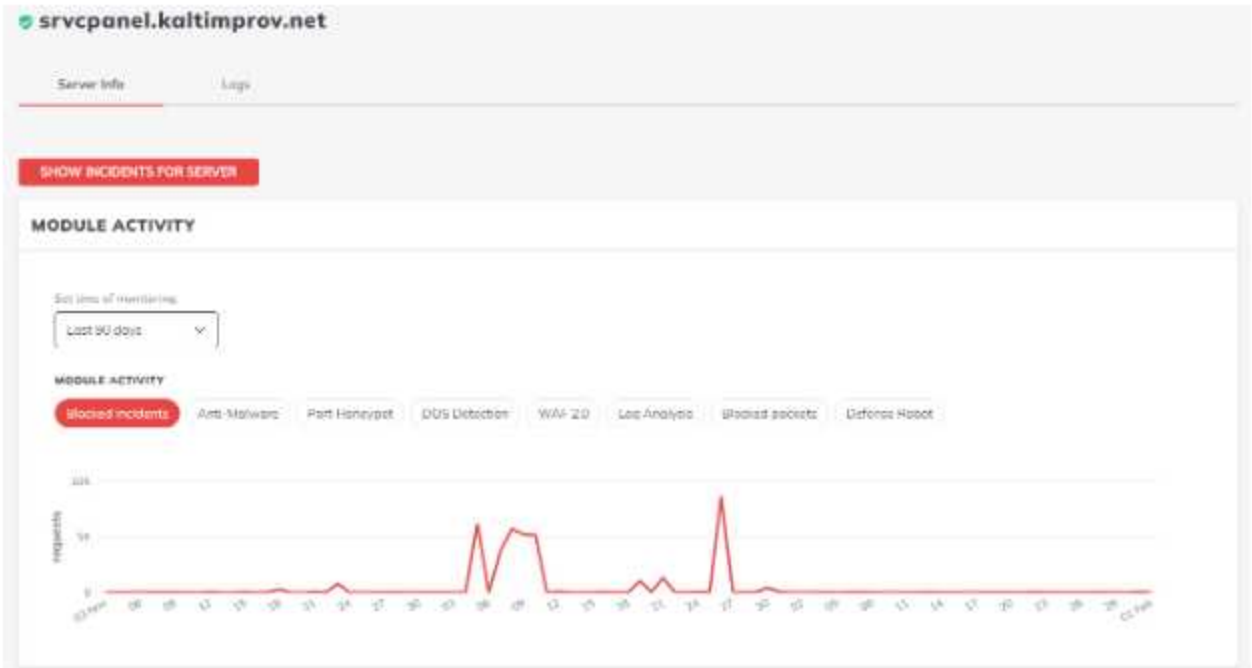
No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Badan Kepegawaian Daerah	eskp.kaltimprov.go.id
2	Badan Kepegawaian Daerah	simpeg.kaltimprov.go.id
3	Badan Kepegawaian Daerah	enonpns.kaltimprov.go.id
4	Badan Kepegawaian Daerah	ecuti.kaltimprov.go.id
5	Badan Kepegawaian Daerah	bkd.kaltimprov.go.id



2. CPANEL Server (38 SE)

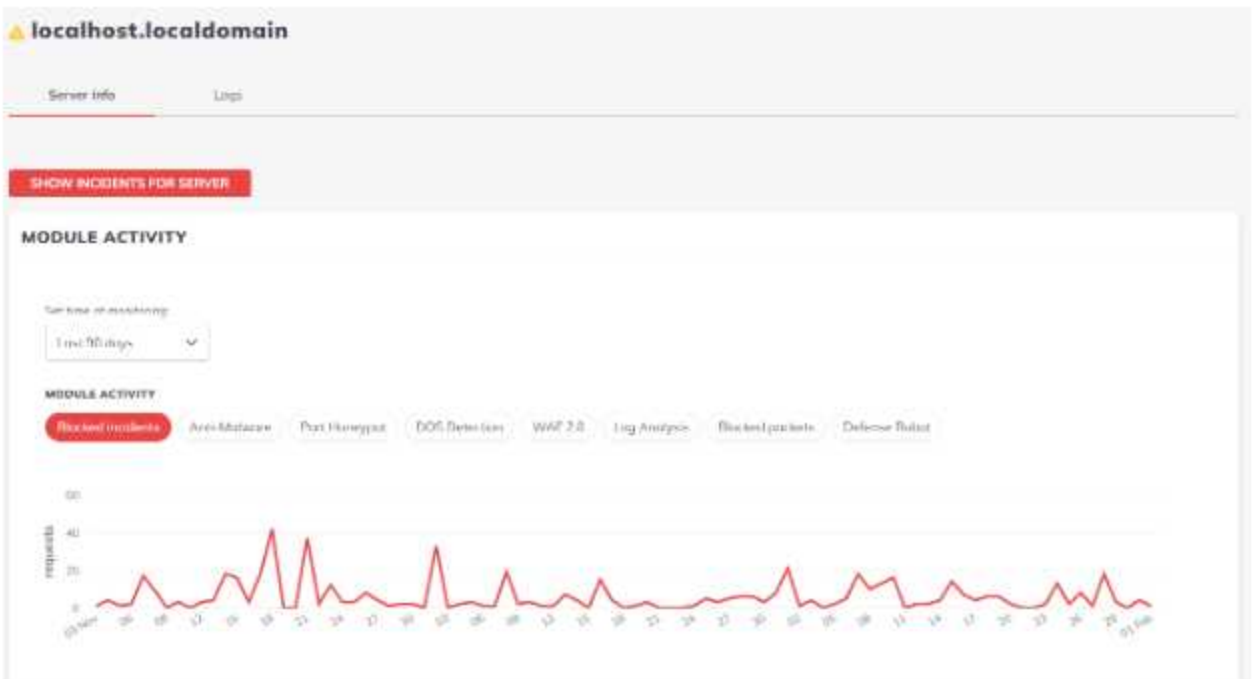
No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	jrp.kaltimprov.go.id
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bpsdm.kaltimprov.go.id
3	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk
4	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	dkp3a.kaltimprov.go.id
5	Dinas Lingkungan Hidup	properdlh.kaltimprov.go.id

6	Dinas Lingkungan Hidup	dinaslh.kaltimprov.go.id
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	ppid.kaltimprov.go.id
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	pemantik.kaltimprov.go.id
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	pion.kaltimprov.go.id
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	aspirasi.kaltimprov.go.id
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	agenda.kaltimprov.go.id
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	semakin.ppid.kaltimprov.go.id
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.kaltimprov.go.id
14	Dinas Kehutanan	dishut.kaltimprov.go.id
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	dpmpd.kaltimprov.go.id
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	indagkop.kaltimprov.go.id
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	esdm.kaltimprov.go.id
18	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.kaltimprov.go.id
19	KPHP Damai	kphpdamai.kaltimprov.go.id
20	KPHP Batuayau	kphpbatuayau.kaltimprov.go.id
21	KPHP Mookmanoorbulatn	kphpmookmanoorbulatn.kaltimprov.go.id
22	KPHP Telake	kphptelake.kaltimprov.go.id
23	KPHP Kendilo	kphpkendilo.kaltimprov.go.id
24	KPHP Delta Mahakam	kphpdeltamahakam.kaltimprov.go.id
25	KPHP Subdas Belayan	kphpsubdasbelayan.kaltimprov.go.id
26	KPHP Meratus	kphpmeratus.kaltimprov.go.id
27	KPHP Berau Tengah	kphpberautengah.kaltimprov.go.id
28	KPHP Berau Pantai	kphpberaupantai.kaltimprov.go.id
29	KPHP Berau Utara	kphpberauutara.kaltimprov.go.id
30	KPHP Berau Barat	kphpberaubarat.kaltimprov.go.id
31	KPHP Kelinjau	kphpkelinjau.kaltimprov.go.id
32	KPHP Bengalon	kphpbengalon.kaltimprov.go.id
33	KPHP Manubar	kphpmanubar.kaltimprov.go.id
34	KPHP Santan	kphpsantan.kaltimprov.go.id
35	KPHP Bongan	kphpbongan.kaltimprov.go.id
36	KPHL Baturook	kphlbaturook.kaltimprov.go.id
37	KPHL Balikpapan	kphlbalikpapan.kaltimprov.go.id
38	Tahurabs	tahurabs.kaltimprov.go.id



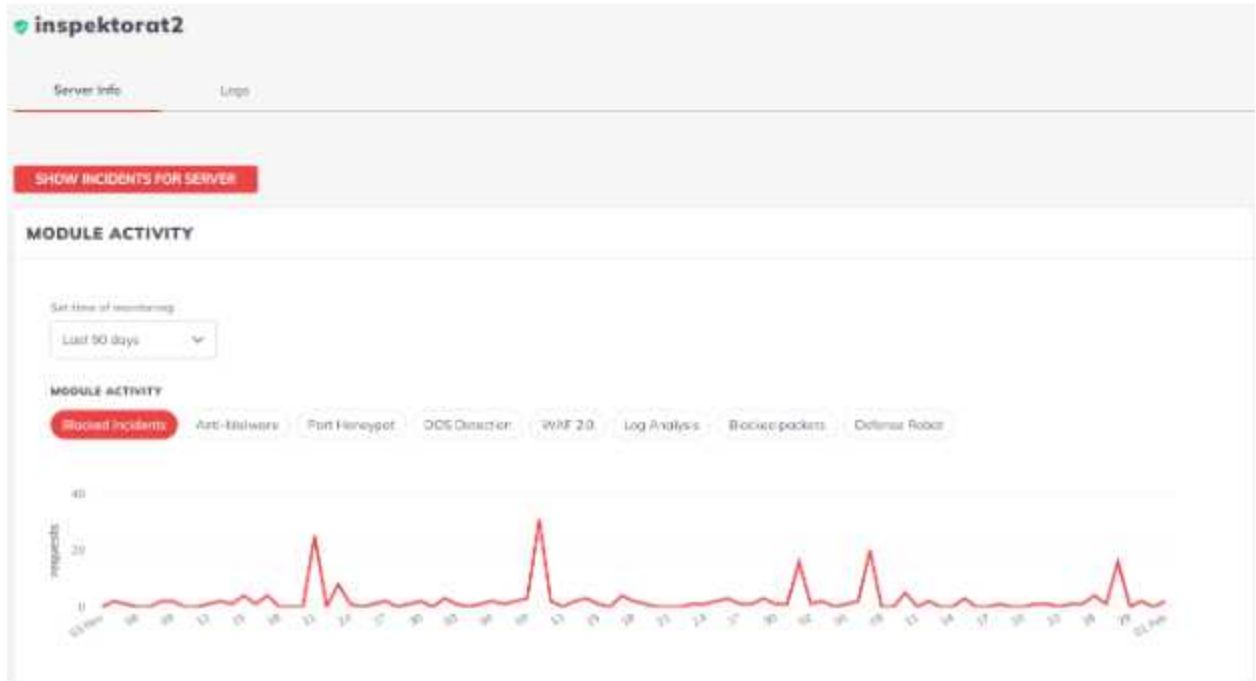
3. Disdikbud Server (2 SE)

No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kerjasama-beasiswa.kaltimprov.go.id
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Web.disdikbud.kaltimprov.go.id

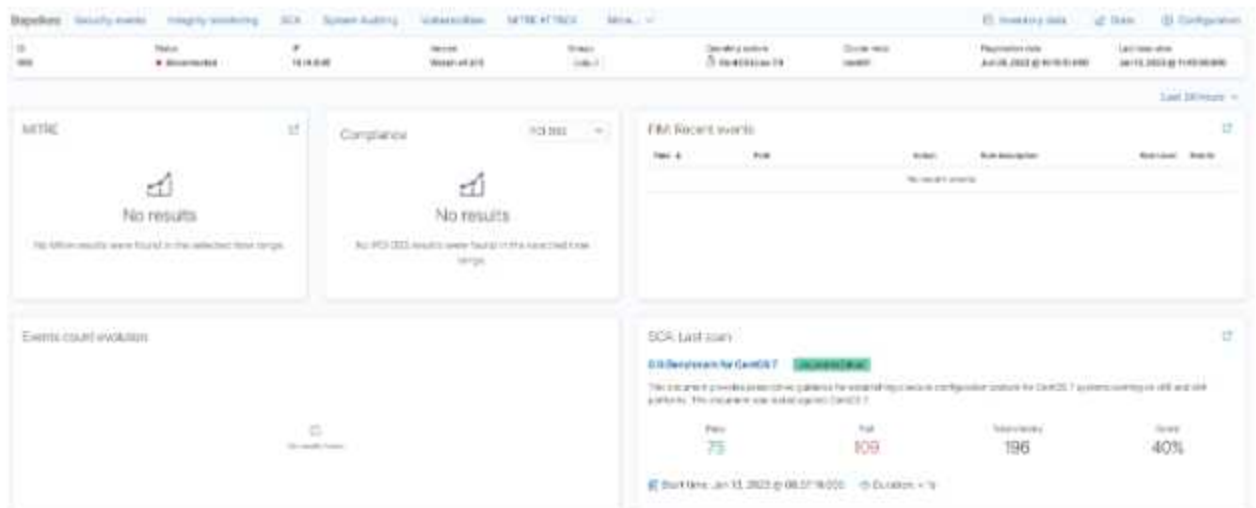


4. Inspektorat (2 SE)

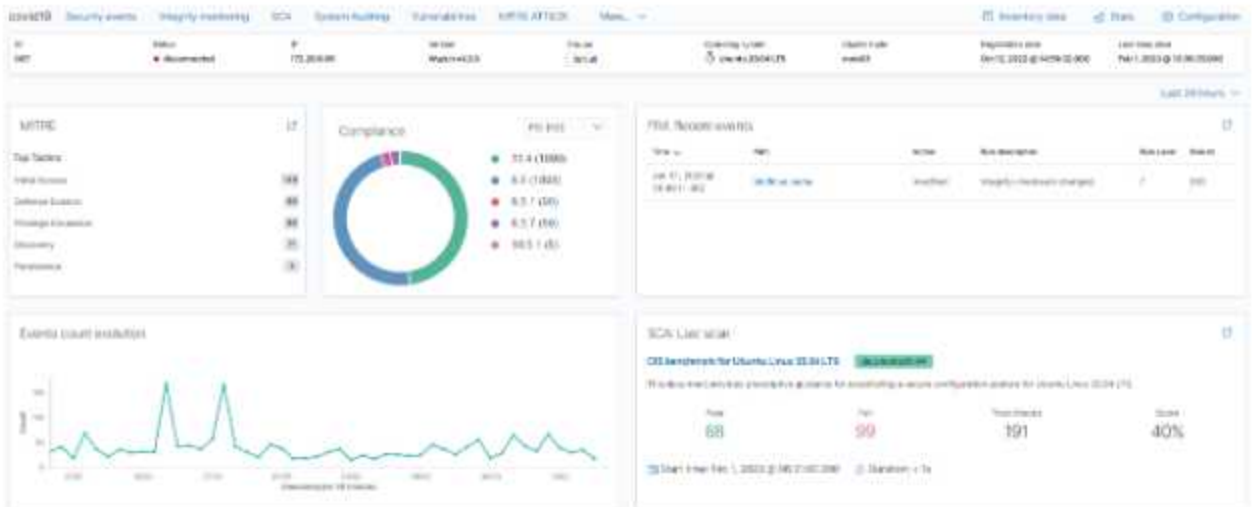
No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Inspektorat	sirrbia.kaltimprov.go.id
2	Inspektorat	simhp.kaltimprov.go.id



5. Server Bapelkes (2 SE)

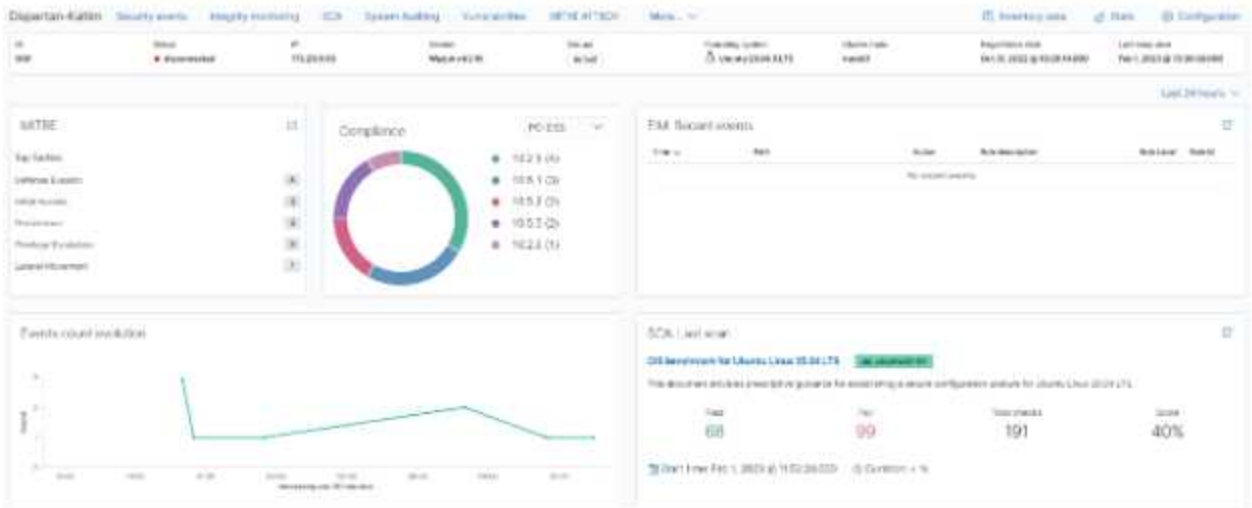


6. RSUD Korpri (1 SE)

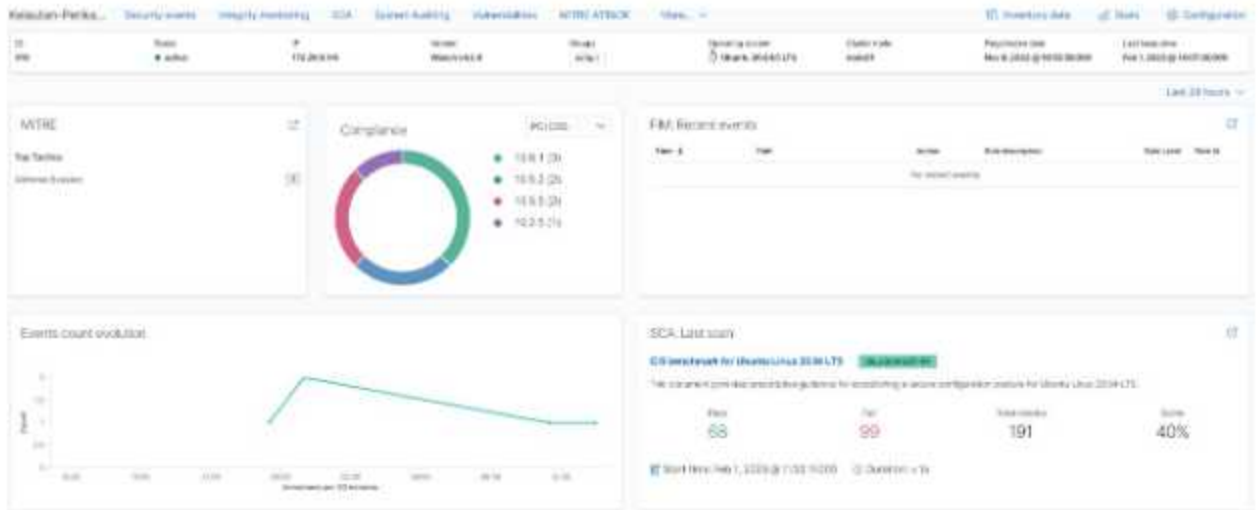


9. Server Dinas Pangan (1 SE)

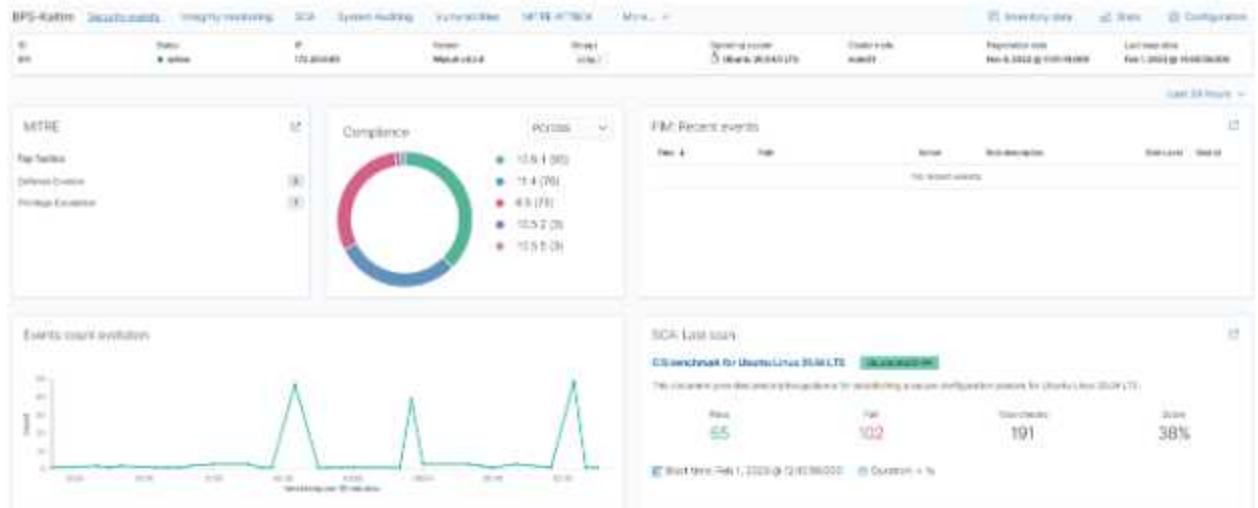
No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	sipkkp.kaltimprov.go.id.



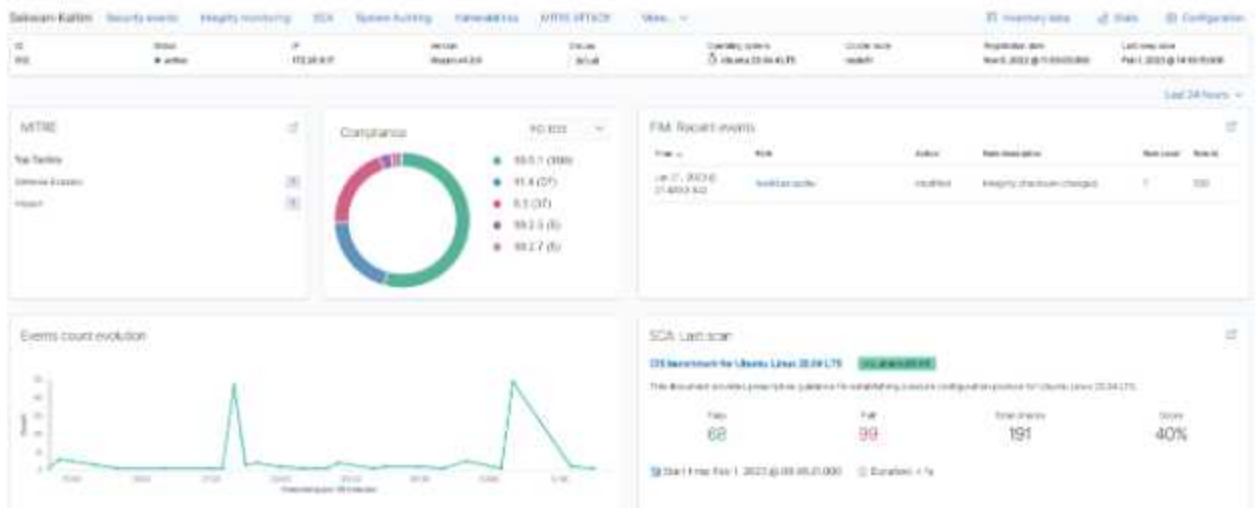
10. Server Dinas Kelautan (1 SE)



11. Server BPS (1 SE)

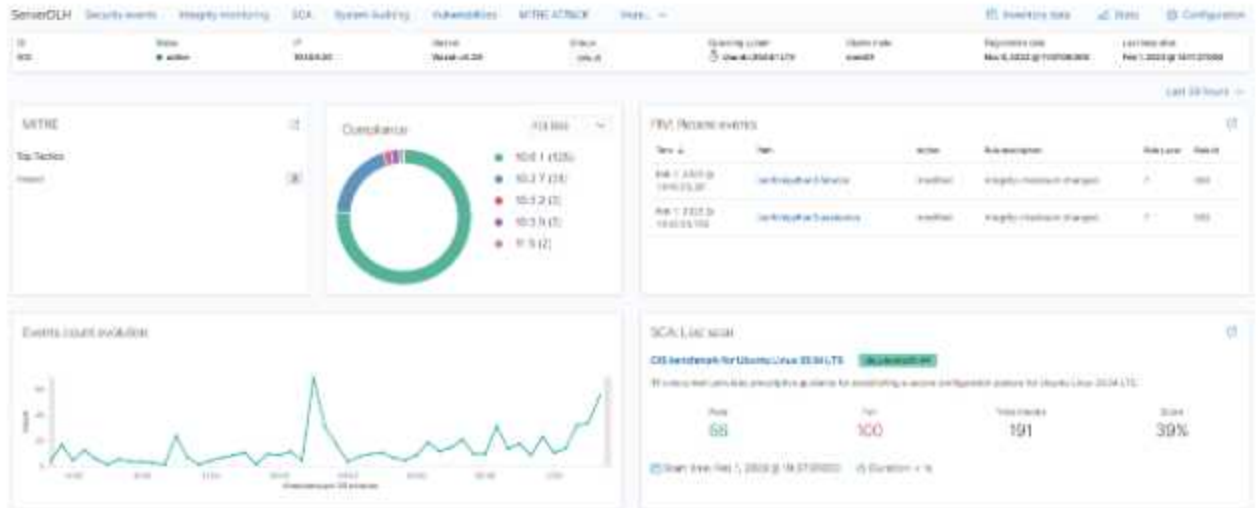


12. Server Sekwan (1 SE)

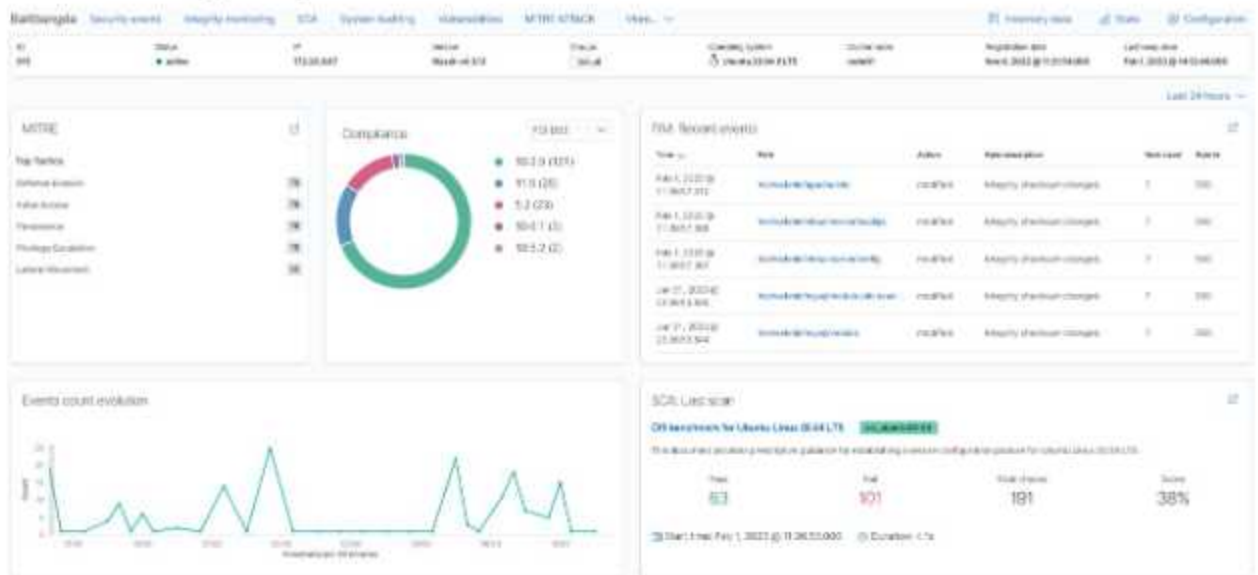


13. Server DLH (1 SE)

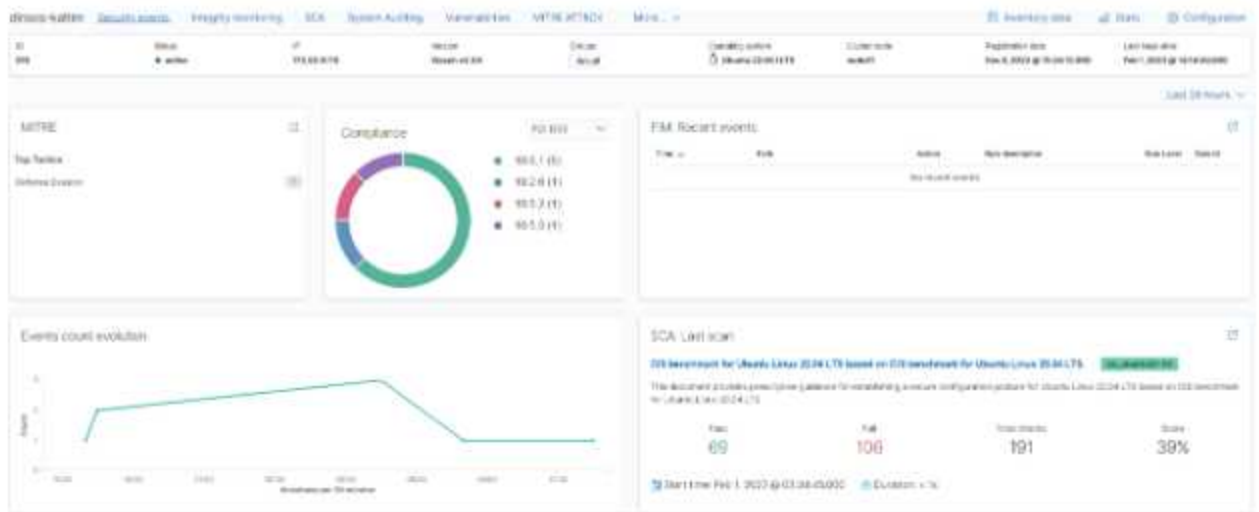
No	Website / Aplikasi	Alamat Link
1	Dinas Lingkungan Hidup	sparkling.kaltimprov.go.id



14. Server Litbang (2 SE)



15. Server Dinsos (1 SE)



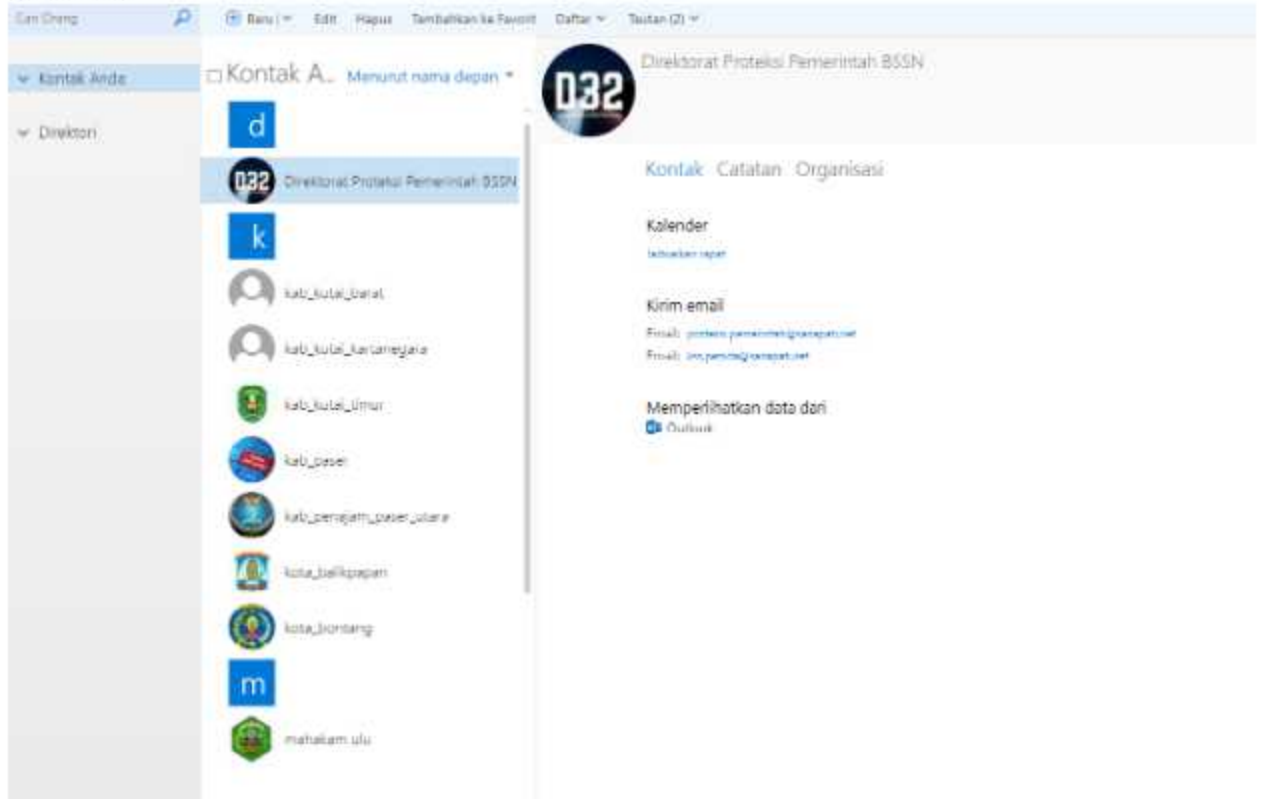
Jumlah keseluruhan 60 Sistem Elektronik

LAMPIRAN 9

Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

1. Pengamanan komunikasi antar Kabupaten/Kota melalui mail.sanapati.net sebanyak 10 Kab/Kota.



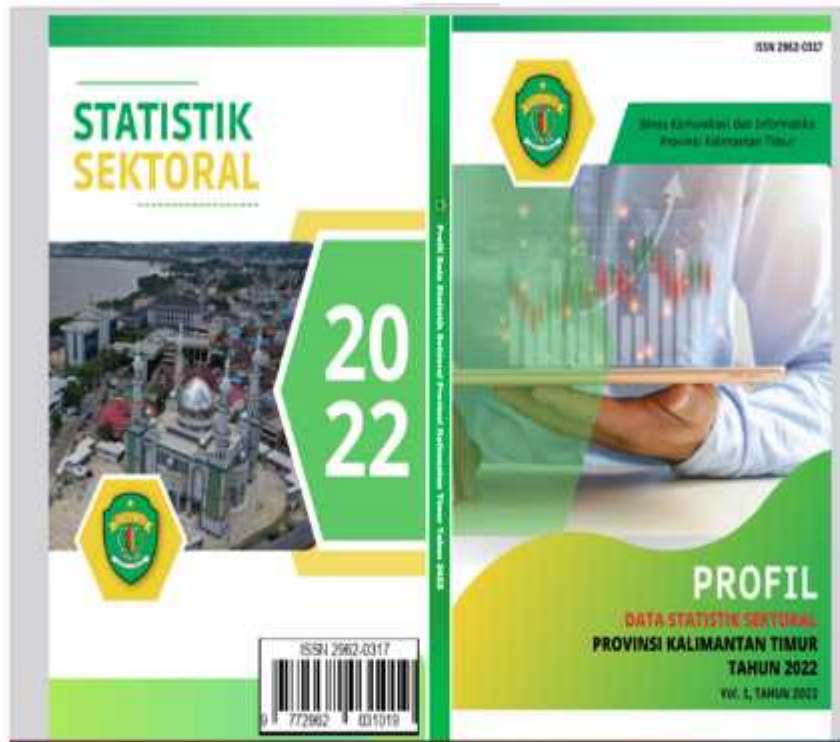
2. Pengamanan komunikasi antar OPD melalui pengamanan dokumen persuratan dengan tanda tangan digital pada sida.kaltimprov.go.id sebanyak 17 OPD

NO	NAMA	NAMA SK	SINGKATAN	ALAMAT	KOP SURAT	LOKO DS	SIDA	FILTER
1	Dinas Komunikasi dan Informatika		Diskominfo	Jl. Besuki Rahmat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
4	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		URPKA	Jl. Dewi Sartika No.13, Sungai Pinang Lest, Kcc. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		DP2KURM	Jl. MT. Haryono No. 45 Samarinda 75124	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		DPMP7SP	Jl. Besuki Rahmat no. 56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
9	Dinas Potomakan dan Kesehatan Hewan		DPKH	Jl. Rhyenyglare	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BPSD	Jl. MT. Haryono	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		DESOM	Jl. MT. Haryono, No. 29 Samarinda	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		BPSDM	Jl. H.A.M. R. Moedin Kel. Harapan Baru, Kcc. Loe Jahan Ilir Kota Samarinda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
26	Dinas Kesehatan		Dinas	Jl. A.W. Sjahrani No.16	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
29	RSUD Abdul Wahab Sjahrie	Direktor RSUD AWS Provinsi Kaltim	RSUDAWS	Jl. Palang Merah Indonesia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1
33	Badan Kepegawaian Daerah		BKD	Jl. M. Yamin	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
36	Dinas Lingkungan Hidup		DLH	Jl. MT. Haryono	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
44	Biro Organisasi	Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalimantan Timur	BiroOrg	Jl. Gajah Mada No 1 Kantor Gubernur Kaltim	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1
48	UPTD BAPELKES		UPTD-BAPELKES	samarinda		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
54	UPTD laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		UPTDLKK	Jl. Ir. H. Juanda No 218		<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura		DPTPH	Jl. Besuki Rahmat No. 6		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dinas Perhubungan		Dishub	Jl. Kusuma Bangsa		<input checked="" type="checkbox"/>		
13	Dinas Pemuda dan Olahraga		Dispora	Jalan K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLATI Kompleks Gelora Kadrie Dening		<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		OPMPD	Jl. M.T. Haryono No 96 A samarinda		<input checked="" type="checkbox"/>		

Jumlah keseluruhan pengamanan PHKS sebanyak 27 titik

LAMPIRAN 10
Buku Profil Data Statistik Sektorial Provinsi Kaltim Tahun
2022

Tahun 2022 Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil menerbitkan Buku Profil Data Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan memuat 322 halaman.



Buku tersebut dapat di akses melalui <https://data.kaltimprov.go.id/home/produk>